

BAB 4

HASIL ANALISIS PENELITIAN

4.1. Hasil Analisis Penelitian

Pada bagian empat akan dibahas hasil penelitian lapangan menjelaskan kecenderungan hubungan variabel-variabel teruji maupun pendapat dari hasil skala likert. Secara umum hasil uji hipotesis ditemukan hubungan lemah antara modal sosial komunitas terhadap daya dukung lingkungan permukiman kumuh dan padat Kampung Rawa Barat. Gambaran umum tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

4.2. Perubahan Kualitas Lingkungan Permukiman

Isu lingkungan merupakan isu yang selalu terkait dengan kehidupan manusia. Dimensi lingkungan dapat dipahami dalam dua konteks yang berbeda¹, yakni konteks lingkungan sebagai ruang fisik tempat berinteraksi berbagai makhluk yang ada di bumi (*physical spatial context*) dan konteks lingkungan sebagai wujud interaksi antar manusia (*social context*). Dalam kenyataannya kegiatan manusia secara umum (*anthropogenic activities*) telah lebih banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius². Pembangunan yang dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup, seringkali justru lebih banyak membawa efek paling besar terhadap degradasi lingkungan. Meningkatnya kebutuhan prasarana dasar dan jumlah penduduk mengakibatkan sumber daya fisik lingkungan harus dimodifikasi sedemikian rupa supaya mampu mengakomodir kepentingan tersebut.

Permukiman kumuh umumnya terjadi di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta adanya eksploitasi sumber daya alam tanpa mengabaikan keberlanjutannya terhadap generasi berikutnya. Kelangkaan prasarana dasar dan ketidakmampuan memelihara serta memperbaiki lingkungan

¹ Jewson, Nic and MacGregor, sussane (eds). 1997. *Transforming Cities:Contested Governance and New Spatial Divisions*. New York:Routledge. Hal 4 - 5

² Mascarehans A. 1994. *The Enviroment Under Structural Adjustment in Tanzania with Spesifik Reference to the Semi Arid Areas*” in (eds). Bagachwa and Limbu *Policy Reform and The Environment in Tanzania*. Dar er Salam. DUP. Hal 37 – 29.

permukiman yang ada merupakan isu utama dari upaya perwujudan lingkungan permukiman sehat, aman, teratur, harmonis dan berkelanjutan. Tidak memadainya daya dukung lingkungan permukiman berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, yaitu kerusakan tata lingkungan, pencemaran, kemerosotan kondisi sosial, ekonomi budaya, terjadinya bencana, dan pola perkembangan lingkungan yang meninggalkan nilai-nilai tradisinya menandai turunnya kualitas lingkungan permukiman.

Pada prinsipnya indikator kualitas permukiman kumuh dan padat adalah sebuah metode pengukuran kuantitatif pada pencapaian sektor-sektor perkotaan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Untuk itulah gambaran umum permukiman kumuh di Kampung Rawa khususnya di RW 01, RW 02, RW 06 dan RW 08 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Table 4.1.
Indeks Jenis Bangunan

Jenis Bangunan	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Permanen	10	28,5	11	34,4	5	11,7	14	36,8
Semi Permanen	23	65,7	20	62,5	30	88,2	24	63
Tidak Permanen	2	5,7	1	3,1				
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Hampir di setiap sudut permukiman kumuh dan padat tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Permukiman kumuh dan padat adalah penyakit kota yang berdampak pada keseluruhan kehidupan kota. Berdasarkan pada tipologi kepadatan, penilaian terhadap derajat kekumuhan merupakan kriteria utama yang penting dalam mengukur daya dukung lingkungan. Kepadatan dimaksudkan sebagai kepadatan penghuni dan kepadatan bangunan permukiman. Semakin banyak penghuni dalam satu rumah yang ukurannya lebih kecil dengan ketiadaan tata kelola ruangan akan mendorong terjadinya kekumuhan.

Struktur bangunan permukiman kumuh dan padat berbentuk vertikal. Pola hunian semacam ini sebagai upaya memanfaatkan keterbatasan lahan dan ruang

dalam menampung penghuninya berpengaruh terhadap model bangunan secara mayoritas berbentuk semi permanen³ dan memiliki ruang petak-petak. Sedangkan sedikit sekali responden yang menyatakan memiliki bangunan permanen ataupun tidak permanen. Berdasarkan pada tabel 4.1 tentang indeks jenis bangunan, dominan berbentuk “semi permanen” yang “tinggi” ditunjukkan berturut-turut di RW 06 sebesar 88,2%, RW 01 sebesar 65,7%, RW 08 sebesar 63% dan RW 02 sebesar 62,5%. Kondisi bangunan hunian di Kampung Rawa Barat memiliki kecenderungan untuk tumbuh lagi menjadi bertingkat-tingkat.

Rumah disini sebagian besar memiliki dua fungsi, pertama untuk tempat tinggal dan kedua adalah untuk melakukan kegiatan usaha/kegiatan ekonomi keluarga. Banyak rumah yang juga berfungsi sebagai warung, sablon, konveksi, penjahit neci, obras, toko kelontong, warung makan dan juga disewakan.

Jumlah ruangan sebagian besar terdiri dari 4 ruang, yaitu Ruang tamu (sekaligus ruang usaha), ruang dapur, Kamar mandi/wc, dan kamar Tidur. Rumah biasanya terdiri dari dua lantai, dengan luas +24 m² di lantai bawah dan +20 m² di lantai atas. Lantai atas umumnya hanya berfungsi sebagai ruang tidur. Umumnya juga, masyarakat sudah memiliki kamar mandi dan dapur didalam rumah tinggalnya, walaupun dengan luasan terbatas. Ruang Tamu, biasanya digunakan dengan fungsi beragam yaitu sebagai ruang tamu, ruang usaha dan juga ruang keluarga. Ruang tidur, umumnya terletak di lantai atas. Satu ruang bisa digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Ada pula yang dipisahkan oleh penyekat kain, ada juga dengan penyekat triplek, untuk memisahkan ruang tidur orang tua dan anak. Dapur, untuk yang memiliki usaha warung makan, dapur digunakan untuk memasak kebutuhan warung sekaligus untuk rumah tangga. Dapur umumnya kering, karena kegiatan cuci mencuci bahan makanan dilakukan di kamar mandi atau diluar rumah. Kamar Mandi/WC, Berfungsi sebagai MCK, sekaligus cuci baju dan cuci piring. Namun sebagian warga masih ada yang melakukan kegiatan cuci di luar rumah.

³ Secara vertikal, hampir semua bangunan memiliki lantai atas. Lantai atas ini umumnya lebih rendah dari lantai bawahnya, bahan yang digunakan pun tidak bersifat permanen seperti lantai dibawahnya. Kebanyakan terbuat dari kayu dan triplek untuk membuat ruang-ruang, sehingga dapat diasumsikan tindakan ini bersifat sementara dan ada kemungkinan untuk tumbuh lagi.

Upaya menambah bangunan diatas bangunan dasar merupakan strategi warga permukiman untuk mensiasati minimnya lahan permukiman yang terbatas, kemampuan ekonomi warga yang terbatas dan ketidakberdayaan warga permukiman dalam menerima proyek pembangunan yang mengesampingkan kelompok minoritas.

Pemakaian ruang hunian cukup beragam, mulai yang paling sederhana sampai yang kompleks. Pemakaian ruang sederhana sekali hanya untuk tidur, sementara yang lebih kompleks adalah untuk menampung kegiatan usaha seperti warung, industri rumahan. Bahkan bukan hanya tempat hunian yang dimanfaatkan untuk aktifitas sehari-hari warga, tapi juga ruang-ruang terbuka (halaman rumah, gang, jalan) dimanfaatkan untuk tempat kegiatan bekerja maupun untuk mempersiapkan produk-produk kerja mereka yang disiapkan maupun digunakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang.

Maraknya pemanfaatan ruang publik atau adanya kecenderungan pola warga permukiman untuk melakukan ekspansi ruang-ruang publik seperti gang dan jalan untuk kepentingan privat seperti memasak di teras rumah, menaruh bak air, memandikan anak merupakan cerminan dari kehidupan permukiman kumuh dan padat. Dalam hal ini dilakukan sebagai upaya atas terbatasnya ruang-ruang hunian rumah tangga dan atau memiliki luas hunian yang tidak memadai untuk menampung kehidupan keluarga.

Tabel 4.2.

Indeks luas hunian

Luas hunian	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	f	%	f	%	F	%	F	%
Kecil	23	65,7	29	90,6	32	94,1	28	73,7
Sedang	9	25,7	2	6,3	2	5,9	10	26,3
Besar	3	8,6	1	3,1				
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Luas hunian selain digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung dan dikaitkan dengan status kesehatan (kelayakan) lingkungan rumah tangga. Berdasarkan pada tabel 4.2

tentang indeks luas hunian, responden menyatakan memiliki luas hunian berukuran “kecil” berkisar antara 10 m² – 30 m² per satuan keluarga “sangat tinggi”. Berturut-turut ditunjukkan di lingkungan RW 06 (94,1%), RW 02 (90,2%), RW 08 (73,7%) dan RW 01 (65,7%). Kondisi luas hunian yang berukuran kecil mencerminkan ketidakleluasaan penghuninya dalam beraktifitas didalam ruangan rumah sehingga memberikan kesan ketidaknyamanan dan menghambat perkembangan kehidupan penghuninya.

Berdasarkan tabel 4.3 tentang jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga memperlihatkan pada kondisi “sedang” berkisar antara 5 – 6 orang per keluarga dan “kecil” berkisar antara dibawah 4 orang per keluarga⁴. Kondisi ini memperlihatkan pada korelasi dengan indeks luas hunian per satu keluarga yang berukuran “kecil” bahwa tidak memenuhi standarisasi SUSENAS Tahun 2005 tentang pemenuhan kenyamanan hunian per satu orang sebesar 8 m². Kondisi ini menunjukkan ketiadaan suasana “*privacy*” bagi anggota keluarga, karena jumlah ruangan terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penghuninya dengan tata kelola ruang hunian buruk yang digambarkan dengan kondisi tempat tinggal kurang memadai.

Sementara status kepemilikan tanah dan bangunan permukiman sudah bersertifikat hak milik dimana sebagian besar diperoleh secara turun temurun (warisan keluarga). Sertifikasi hak milik berjalan sejak tahun 1999 melalui World Bank dengan program AJUDIKASI dan tahun 2008 melalui Pemprov DKI Jakarta dengan program PRONA⁵. Sedangkan sedikit warga yang masih menyewa atau kontrak dan biasanya mereka yang menyewa/kontrak merupakan penduduk musiman yang tidak masuk dalam penduduk tetap. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang berketetapan hukum merupakan cerminan status sosial yang kuat dan tidak rentan terhadap kebijakan pemerintahan dalam melakukan pengusuran

⁴ Bangunan hunian satu pondasi yang berbentuk vertical atau horizontal yang dibikin sekat-sekat berukuran 10 – 30 m² untuk satu keluarga. Setiap satu keluarga hanya terpisahkan oleh sekat-sekat yang terbuat dari kayu, triplek atau gipsum dan tembok yang bersifat permanen. Biasanya mereka masih dalam satu ikatan perkerabatan keluarga.

⁵ Wawancara mendalam dengan ketua RW 01, RW 06, RW 08 yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2008. Pkl. 20.00 wib di tempat kantor P2KP Kampung Rawa. Program Nasional (PRONA) dan AJUDIKASI merupakan program sertifikasi tanah hak milik warga yang sebelumnya tidak ada kejelasan status tanah dan bangunan yang selama ini dijadikan tempat hunian.

wilayah permukiman padat dan kumuh yang dianggap menghambat perkembangan kota.

Tabel 4.3.

Jumlah anggota per keluarga

Jumlah anggota per keluarga	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	F	%	f	%	F	%	f	%
Kecil	27	77,1	22	68,7	18	52,9	22	57,9
Sedang	8	22,9	6	18,7	10	29,4	15	39,5
Tinggi					6	17,6	1	2,6
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Kondisi jalan sebagai alat untuk mengintegrasikan kegiatan sosial ekonomi warganya dapat dipergunakan secara efektif. Jaringan jalan disini tidak hanya memiliki arti, tetapi tempat lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, juga berarti ruang publik tempat warga melakukan interaksi sosial (*the place of social interaction*). Ibu-ibu pada waktu belanja, menggunakan tempat ini untuk berkumpul dan berdialog. Anak-anak kecil menggunakan tempat ini untuk bermain-main di luar rumah. Sementara para pemuda, nongkrong di bibir jalan atau di pagar rumah sambil ngobrol-ngobrol.

Hirarki jalan di kelurahan Kampung Rawa ada 3, yaitu :

1. Jalan Raya Utama
2. Jalan Lingkungan, dan
3. Jalan Kampung.

Jalan kampung adalah jalan yang langsung menghubungkan seluruh permukiman di wilayah. Jalan kampung ini berukuran 1 meter – 1.5 meter dan di kanan – kirinya terdapat selokan dengan lebar kurang lebih 30cm. Jalan ini lebih banyak dilalui oleh pengendara sepeda motor, sepeda dan pejalan kaki, juga dilalui oleh pedagang gerobak sayur keliling, pedagang air keliling dan digunakan untuk anak – anak balita bermain.

Lebar jalan yang tidak terlalu besar, membuat kendaraan yang melaluinya pun tidak dengan kecepatan yang tinggi melainkan perlahan dan hati-hati. Kondisi ini mungkin yang menyebabkan jalan ini selain berfungsi sebagai jalur sirkulasi, juga digunakan anak-anak untuk bermain, karena aman dari lalu-lalang kendaraan. Jalan juga digunakan untuk pedagang keliling berjualan (seperti tukang sayur, tukang bakso dan tukang air), dipertigaan jalan atau disudut gang mereka berhenti untuk menunggu pembeli yang mendatangnya. Pembeli umumnya ibu rumah tangga dan tempat ini biasanya menjadi ajang berdialog atau bergosip.

Berdasarkan pada tabel 4.4 tentang jarak antar rumah permukiman, tingkat kerapatan antar bangunan hunian sangat “tinggi” berkisar antara 0 meter - 1 meter atau hampir tidak ada ruang terbuka antar rumah sehingga berpengaruh terhadap kualitas pertumbuhan kehidupan komunitas. Kerapatan hunian yang sangat tinggi juga memperlihatkan berbagai ancaman-ancaman seperti bencana kebakaran dan memudahkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, bronchitis ataupun sejenisnya menyebar secara pesat.

Tabel 4.4.

Jarak antar rumah lingkungan permukiman

Jarak antar hunian	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	f	%	F	%	f	%	F	%
Tinggi	35	100	32	100	32	94,1	23	60,5
Sedang					2	5,9	12	31,5
Rendah							3	7,8
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Kemudian berdasarkan pada karakteristik sosial warga permukiman kumuh memiliki tingkat heterogenitas sosial tinggi. Heterogenitas sosial permukiman terukur berdasarkan jenis pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan tingkat keamanan lingkungan.

Berdasarkan pada tabel 4.5 tentang jenis pekerjaan kepala keluarga memperlihatkan keragaman yang cukup tinggi. Sektor formal diperlihatkan di RW

01(51,4%) dan RW 02 (47,5%) dimana yang termasuk ke dalamnya yaitu PNS dan pegawai swasta yang bekerja dikantoran. Kemudian sektor semi formal (UMKM) di tunjukkan di RW 01 (34,3%), RW 02 (39,3%) yaitu warga yang bekerja sebagai pemilik usaha resmi tapi tatacara pengelolaannya dikerjakan secara informal dan RW 08 (36,8%) dan warga yang bekerja disektor informal⁶ RW 01 (14,3), RW 02 (21,9), RW 06 (94,1%), dan RW 08 (55,3%) dimana yang termasuk dalam kategori ini adalah buruh dan ibu rumah tangga.

Ini memberikan gambaran bahwa kegiatan ekonomi warga permukiman tampil dalam berbagai bentuk semi formal dan informal yang dapat saling bersaing, saling mendukung atau masuk dalam kategori ekonomi subsisten⁷ dan biasanya dilakukan secara mandiri. Jenis-jenis pekerjaan warga dominan dilakukan di lingkungan permukiman dengan memanfaatkan area publik untuk kepentingan komersil seperti di pinggir jalan ataupun di gang. Juga memanfaatkan rumah hunian sebagai tempat kegiatan ekonomi keluarga.

Ruang usaha digunakan di rumah-rumah penduduk sebagai upaya peningkatan pendapatan dan pelayanan lingkungan. Usaha rumahan yang paling menonjol di sini adalah industri pengolahan tahu tempe, bengkel, toko besar sampai kecil, dan warung-warung kelontong. Secara keseluruhan hampir ruangan yang tersisa digunakan untuk tempat usaha, oleh warga yang menggunakan rumahnya secara dwi fungsi. Usaha rumahan yang menonjol ini menandakan dilingkungan ini praktik usaha industri rumahan memiliki pasar dan pemasaran yang jelas selama bertahun-tahun. Usaha ini tampaknya sudah saling mengait diantara lingkungan sekitar, karena masing-masing ada yang saling mengerjakan pekerjaan yang sama dengan skope pekerjaan yang berbeda. Semua bentuk

⁶ Sektor semi formal yaitu jenis pekerjaan berbadan hukum dan memiliki modal kecil seperti Usaha angkutan umum, bengkel las, bengkel elektronik, wartel, penjual voucher pulsa, pembuat tempe tahu dan pedagang toko yang berada di wilayah pasar gembrong, dengan manajemen pengelolaannya secara informal sedangkan sektor informal yaitu jenis pekerjaan yang tidak memiliki badan hukum seperti warteg, warung kelontong, warung rokok, penjaga toko, buruh cuci, pekerja bangunan.

⁷ Beberapa proses produksi dan konsumsi terjadi atau terpenuhi di dalam lingkungan atau terjadi antar penduduk sendiri (Evers, 1995 :10-18) . Produksi subsisten lingkungan (*habit subsistence production*) dikota digambarkan dengan sikap gotong royong kelompok lapisan bawah dalam memenuhi kebutuhan sendiri dan konsumsi kolektif. Bercampurnya sistem ekonomi subsisten dan sistem kapitalis atau ekonomi campuran menjadi ciri khas Asia Tenggara terutama yang hidup dikampung kota. (Keyen,2002; Evers,1995; Jellinek, 1995)

kegiatan ekonomi warga komunitas memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakatnya dari kegiatan yang sifatnya padat karya dan usaha sendiri, dari upah yang bersifat balas jasa, upah tenaga kasar, upah tenaga lepas sampai pada yang sifatnya tidak tetap, kontrak dan pekerjaan tetap.

Tabel 4.5.

Indeks jenis pekerjaan

Jenis Pekerjaan	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	F	%	F	%	f	%	f	%
Formal	18	51,4	14	47,5	1	2,9	3	7,9
Semi formal	12	34,3	11	39,3	1	2,9	14	36,8
Informal	5	14,3	7	21,9	32	94,1	21	55,3
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Selanjutnya, keragaman jenis pekerjaan akan berpengaruh terhadap keragaman pendapatan rumah tangga per bulannya. Berdasarkan pada tabel 4.6. Indeks tingkat pendapatan warga yang diperoleh dari kepala keluarga dapat dikategorikan “menengah” cukup “tinggi” dimana hampir semua RW memiliki pendapatan berkisar antara Rp. 900 ribu – Rp. 1.750 ribu/bulan⁸ per kepala keluarga. Sedangkan pendapatan warga rendah hampir relative sedang yang berkisar antara Rp.400 ribu – Rp.800 ribu yang disesuaikan dengan tingkat pengeluaran per bulannya⁹.

Pendapatan per bulan tersebut masih tidak seimbang dengan tingginya harga kebutuhan pokok di ibukota sehingga pendapatan yang relatif rendah per kepala keluarga dalam kehidupan perkotaan merupakan cerminan tingkat kemiskinan yang berakibat pada rentannya ketahanan ekonomi warga permukiman. Untuk mensiasati rendahnya pendapatan keluarga, biasanya kepala

⁸ Pendapatan tersebut diatas Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2009 sebesar Rp. 1.070.000,- per orang dan diatas standard penilaian perkembangan penduduk berdasarkan MDGs yaitu pendapatan penduduk \$ 1 per hari (world bank) sehingga jumlah populasi penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari \$ 1 perhari dapat teratasi dan pengurangan tingkat kemiskinan yang ekstrim dapat terpenuhi sesuai dengan target sampai tahun 2015.

⁹ Pengeluaran keluarga per bulannya berkisar antara Rp. 400 ribu – Rp. 1.750 ribu sehingga cenderung tidak ada kemampuan dan kesempatan untuk menyisihkan (menabung), karena semua pendapatannya per bulannya habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti membeli sembako, membayar listrik, telp dan air, transportasi, membayar biaya pendidikan anak.

keluarga mendapat bantuan pendapatan dari anggota keluarga dengan berdagang di rumah, membuka kios rokok di pinggir jalan, atau bekerja sebagai buruh cuci dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan ekonomi informal dan semi formal warga memproduksi bahan-bahan kebutuhan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan warga permukiman sendiri, artinya sedikit sekali untuk memenuhi kebutuhan warga diluar permukiman.

Tabel 4.6.

Indeks tingkat pendapatan kepala keluarga per bulan

Pendapatan kepala keluarga per bulan	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	f	%	f	%	F	%	f	%
Rendah	9	25,7	11	34,4	9	26,5	16	42,1
Menengah	23	65,7	19	59,4	23	67,6	18	47,4
Atas	3	8,6	2	6,2	2	5,9	4	10,5
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti.

Sementara berdasarkan tabel 4.7. Pendidikan warga di komunitas dapat dikategorikan berpendidikan “menengah dan rendah”. Lulusan SMA dapat ditunjukkan di RW 01 (62,8%), RW 02 (46,9%), RW 06 (41,2%) dan RW 08 (63,2%), sementara yang tidak lulus pendidikan 9 tahun dan atau yang lulus di RW 01 (34,3%), RW 02 (37,5%), RW 06 (58,8%) dan RW 08 (34,2%)¹⁰. Namun kondisi ini dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan belum menjamin perbaikan kualitas hidup karena lulusan setingkat SMA belum mampu berkompetisi dengan lulusan pendidikan S1 yang lebih banyak di butuhkan pasar industri.

¹⁰ Berdasarkan penilaian MDGs, penduduk memperoleh pendidikan dasar yang bersifat universal dengan target ; memastikan pada tahun 2015, seluruh anak-anak dimanapun baik perempuan dan laki-laki mampu menyelesaikan seluruh pelajaran di sekolah dasar. Dengan Indikator : Perbandingan bersih pendaftaran di Pendidikan Dasar (UNESCO / United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), Jumlah murid dari tingkat 1 (kelas 1 SD) yang berhasil mencapai tingkat 5 (kelas 6 SD) (UNESCO), Jumlah penduduk usia 15 sampai 24 tahun yang mampu membaca / tidak buta huruf (UNESCO)

Tabel 4.7.
Pendidikan warga

Pendidikan warga	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Rendah	12	34,3	12	37,5	20	58,8	13	34,2
Menengah	22	62,8	15	46,9	14	41,2	24	63,2
Tinggi	1	2,9	1	3,1			1	2,6
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Labour Otak, atau kemampuan berfikir manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Secara keseluruhan kepala keluarga penduduk disini dari segi pendidikan mayoritas adalah tamat SMP dan SMA, otomatis untuk golongan ini karya yang dapat di sumbangkan adalah lebih banyak pada karya fisik, seperti buruh bangunan, pedagang keliling, dll. Kebutuhan mereka dalam menjaga kenyamanan raganya adalah dengan istirahat (terutama tidur) adalah sangat besar. Artinya untuk bertinggal, yang paling penting bagi mereka adalah tempat yang bisa digunakan untuk tidur, karena dengan tidur mereka bisa mengembalikan stamina yang harus digunakan kembali esok harinya. Sehingga secara spasial, kebutuhan ruang tinggal mereka tidaklah terlalu kompleks. Sedangkan kebutuhan untuk berhubungan dengan antar manusia secara nyaman tidaklah dibutuhkan ruang khusus baik ditempat tinggal ataupun di lain tempat, nongkrong didepan rumah adalah kegiatan mereka berhubungan dengan manusia lain.

Lain halnya dengan ibu-ibu rumah tangga dari golongan ini pula yang tinggal dirumah, aktifitasnya dipengaruhi oleh statusnya sehingga ruang yang dibutuhkan adalah lebih banyak untuk *labour mind* dan *lobour body* yang bersifat tukar pikiran dengan tetangga, menonton televisi dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan karya (*work*) kadang untuk yang cukup mampu adalah dengan membuka warung, menerima jahit neci, pasang kancing atau menerima buruh cuci dan setrika. Sehingga kebutuhannya akan ruang adalah sebagai ruang multi fungsi, ruang tidur, km/wc, jemur dan dapur.

Kemudian secara umum tindak kriminalitas yang terjadi di permukiman tidak masuk dalam kategori “rawan”, tetapi masih memiliki potensi terjadinya

tindak kriminalitas baik yang dilakukan oleh warga komunitas ataupun warga luar komunitas. Terjadinya tindak kriminalitas dalam sebulan mencerminkan dari kurang maksimalnya warga ataupun pihak kelurahan dalam mengelola lingkungan sosial dan budaya secara terpadu, walaupun itu ada seperti FAKTA tidak bekerja secara maksimal. Responden di RW 01(88,6%), RW 02 (59,4%), RW 06 (94,1%) dan RW 08 (57,9%) mengatakan kadang-kadang terjadi tindak kriminalitas dan RW 01 (11,4 %) dan RW 08 (2,6%) mengatakan sering terjadi dan sedikit sekali yang mengatakan tidak pernah atau tidak ada yang menyatakan sering terjadi, sehingga bisa disebut “aman”.

Kondisi seperti diatas memberikan bukti bahwa kedekatan secara fisik belum tentu menjamin dekat secara sosial. Hal ini tercermin dari “kadang-kadang” terjadinya tindak kriminalitas seperti “tawuran”, pencurian ataupun “cekcok” antar warga dalam sebulan. Kedekatan secara sosial akan menjamin berlangsungnya kehidupan yang harmonis dan tentunya dapat memfungsikan warga permukiman sebagai warga yang tertib secara sosial.

Tabel 4.8.

Intensitas terjadinya tindak kriminalitas antar warga

Intensitas Kriminalitas	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	f	%	f	%	f	%	F	%
Sangat Sering	-							
Sering	4	11,4					1	2,6
Kadang	31	88,6	19	59,4	32	94,1	22	57,9
Tidak pernah			13	40,6	2	5,9	15	39,5
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Berdasarkan pada tipologi kualitas lingkungan fisik, maka derajat kekumuhan lingkungan permukiman dapat diukur dengan melihat daya dukung lingkungan fisik-sosial berupa ketersediaan udara bersih, air bersih, saluran limbah, ketersediaan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman kumuh dan padat.

Derajat kepadatan bangunan yang sangat tinggi dan tata kelola ruang-lahan tidak teratur mengakibatkan ketersediaan udara bersih tidak memadai. Berdasarkan pada Tabel 4.9 tentang ketersediaan udara bersih, responden di RW 02, RW 06, dan RW 08 dapat dikategorikan kurang memadai atas ketersediaan udara bersih. Rendahnya ketersediaan udara bersih sangat mengganggu aktifitas dan pertumbuhan lingkungan yang menjamin keberlangsungan kehidupan komunitas. Dalam hal ini dapat berakibat pada serangan penyakit pernafasan, ataupun dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

Kualitas udara menjadi terganggu akibat padatnya hunian, nyaris tak ada lagi ruang terbuka "*open space*", sebab atap dengan atap dari masing-masing rumah saling tumpang-tindih (tutup menutupi satu dengan yang lain). Tak ada lagi ventilasi sebagai sarana sirkulasi udara yang bermanfaat untuk melakukan proses pergantian udara secara alami sehingga tidak ada udara yang bersih yang layak dihirup warga permukiman, walaupun ada itupun terbatas dan tidak memadai. Tentunya semua kondisi ini akan mengganggu keberadaan makhluk hidup khususnya manusia.

Tabel 4.9.

Ketersediaan udara bersih

Ketersediaan udara bersih	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	F	%	f	%	f	%	f	%
tidak memadai karena dapat menimbulkan ISPA, TBC	7	20.0					2	5.3
kurang memadai karena berdebu & bising sehingga dapat menimbulkan stress	9	25,7	32	100	28	82,4	31	81.6
memadai sehingga menimbulkan kenyamanan warga	14	40.0			6	17,6	3	7.9
sangat memadai sehingga aman dan nyaman	5	14.3					2	5.3
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Persyaratan kualitas air bersih & air minum berdasarkan Permenkes no. 416/MENKES/PER/IX/1990 sudah dapat terjangkau di permukiman warga.

Ketersediaan air bersih dalam jumlah normal sangat mudah dipenuhi¹¹. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk keperluan air minum menggunakan sarana PAM dan isi ulang. Dari segi kualitas air dari sumber air bersih layak dikonsumsi dan dimanfaatkan warga untuk aktifitas minum, mandi, cuci dan kakus (MCK), banyaknya responden menyatakan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari dari sarana PAM dan sumur pantek. Sangat sedikit sekali responden yang menyatakan pemenuhannya dari beli/isi ulang/gallon. Hal ini menunjukkan bahwa sarana ketersediaan air bersih di permukiman dapat dikategorikan sudah “layak”.

Tabel 4.10.

Indeks ketersediaan air bersih

Sumber air bersih	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	F	%	f	%	f	%	f	%
PAM	33	94,3	32	100	13	38,2	16	42,1
Sumur pantek	1	2,9			19	55,9	21	55,3
Beli/isi ulang/galon					2	5,9	1	2,6
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Kondisi drainase atau kondisi saluran air ditunjukkan dengan banyaknya responden menyatakan kurang memadai sehingga rentan terhadap berbagai polusi ataupun bencana banjir dan sedikit sekali responden menyatakan lebih bervariasi. Ini menggambarkan kondisi drainase tidak menyeluruh berfungsi dan dikelola secara baik oleh warga. Demikian sempitnya lahan sehingga saluran-saluran drainase dimanfaatkan sebagai area untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Warga disini menggunakan saluran got di jalan kampung sebagai pembuangan air kotor. Namun tampaknya selain buangan air kotor, warga juga membuang kotoran/sampah ringan di saluran ini. Got disepanjang jalan kampung yang

¹¹ Wilayah Kampung Rawa merupakan wilayah yang pernah mendapatkan program “ Muhammad Husni Tamrin” pada tahun 1990 dengan prioritas pembangunan infrastruktur jalan raya dan Infrastruktur jaringan pipanisasi air bersih dari PAM Jaya sehingga sarana ketersediaan air bersih sudah dapat terlayani secara memadai walaupun warga juga menggunakan air bersih dari sumur pantek sebagai alternatif untuk menghemat biaya pengeluaran.

terbuka, juga digunakan oleh pemilik warung makan sebagai buangan air cucian piring, dan cucian sayuran sebelum dimasak.

Oleh ibu-ibu yang kurang memiliki ruang untuk mencuci baju, saluran ini sekaligus digunakan sebagai saluran pembuangan air deterjen sisa mencuci. Mereka mencuci baju tepat ditepi jalan diatas saluran drainase. Sistem pembuangan yang tidak tertib nampaknya menimbulkan kemacetan pada saluran air, sehingga terlihat dari kualitas airnya yang berwarna hitam dan berbau, dikarenakan tidak adanya aliran yang lancar. Kemampuan saluran untuk menampung buangan dan mewadahi ruang tertentu, diluar kemampuan saluran tersebut sehingga terjadi saluran tersumbat dan menimbulkan lingkungan yang tidak sehat.

Sistem drainase yang tertutup banyak terdapat di ruang-ruang yang digunakan sebagai ruang publik, seperti tempat ronda dan didepan warung sayur/warung kelontong. Saluran yang tertutup ini, membuat jalan menjadi lebih lebar dan bersih karena tidak terlihat genangan air yang menghitam seperti di saluran yang terbuka.

Table 4.11.

Kondisi saluran air limbah selokan

Kondisi saluran limbah	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	F	%	f	%	f	%	f	%
terpelihara sehingga berfungsi dengan baik	10	28.6			11	32.4	4	10.5
kurang terpelihara sehingga kurang memadai	22	62.9	32	100	19	55.9	23	60.5
tidak terpelihara sehingga tidak berfungsi	3	8.6			4	11.8	10	26.3
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Berdasarkan pada tabel 4.12. Ketersediaan Ruang terbuka hijau atau taman bermain sangat rendah. Banyaknya responden menyatakan “tidak ada” ketersediaan ruang terbuka hijau atau taman, dan sedikit sekali responden yang

menyatakan “ya”. Ketersediaan ruang terbuka sebagai tempat bersosialisasi atau bermain antar warga yang buruk berakibat pada kebiasaan warga permukiman kumuh dan padat melakukan kegiatan bermain dan bersosialisasi di jalan-jalan atau gang. Kondisi lingkungan semacam ini memperlihatkan ketersediaan oksigen/udara bersih dan daerah resapan air terbatas akan berpotensi terhadap ancaman ketersediaan udara yang tidak sehat dan banjir.

Tabel 4.12.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan ruang terbuka hijau	RW 01		RW 02		RW 06		RW 08	
	f	%	f	%	f	%	F	%
Ya	3	8,6	1	3,1	1	3	2	5,3
Tidak ada	32	91,4	31	96,9	33	97	36	94,7
Total	35	100	32	100	34	100	38	100

Sumber : data empiris peneliti

Kondisi hunian sehat harus memenuhi standar kebutuhan penghuninya baik dari aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Dari gambaran diatas, memperlihatkan kondisi hunian sehat belum memenuhi :

1. Kebutuhan fisik dasar penghuninya seperti ventilasi dan pembuangan limbah.
2. Kebutuhan kejiwaan dasar penghuninya seperti penataan ruang tidak menjamin *privacy* anggota keluarga.
3. Pola tata letak rumah yang tidak teratur meliputi jarak antar rumah, jarak antar rumah dengan jalan, tertib RUTRK (Rencana Utama Tata Ruang Kota)

Keterbatasan ruang dan lahan tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah warganya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga menurunkan kualitas lingkungan permukiman dan berpengaruh terhadap menurunnya kualitas hidup warganya. Tingginya tingkat kekumuhan didasarkan pada tipologi kepadatan hunian, kepadatan lingkungan ekonomi sosial, dan ketersediaan sarana kualitas lingkungan yang rendah akan menyebabkan

perubahan perilaku sosial-ekonomi warganya. Maka dapat dikategorikan bahwa daya dukung lingkungan yang tidak memadai di permukiman Kampung Rawa Barat ditandai dengan sifat kepadatan, kekumuhan dan kemiskinan yang meluas.

4.3. Dinamika Kehidupan Sosial di Permukiman Kumuh

Keadaan sosial budaya Kampung Rawa adalah serba kompleks dan sangat heterogen. Kota sering diberi julukan sebagai ‘tempat berkumpulnya’ (*melting pot*) dari semua macam dan asal kebudayaan, dari yang bercirikan lokal, kedaerahan, dari yang bercirikan etnis tertentu sampai agama dan budaya tertentu. Kesemuanya hadir dan perlu mendapatkan penampungan dan penyaluran diberikan ruang gerak dan insentif untuk menumbuh kembangkan kehidupannya.

Dalam pertumbuhan kota lebih lanjut, permukiman kumuh dan padat Kampung Rawa telah menyerap pendatang dan perantau yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya nusantara, mengalir ke kota melalui saluran famili, kerabat, dan teman sekampung. Maka permukiman kumuh dan padat Kampung Rawa tumbuh menjadi permukiman etnis sukubangsa yang semakin lama semakin padat dan melebar serta semakin tinggi tingkat heterogenitas identitas etnisnya.

Menurut Veeger (1985:149) terjadinya penambahan penduduk (perubahan demografik) akan disertai oleh penambahan frekuensi komunikasi dan interaksi antara para anggota, maka makin besarliah jumlah orang yang menghadapi masalah yang sama. Selain itu, kompetisi untuk mempertahankan hidup semakin memperbesar persaingan diantara mereka dalam mendapatkan sumber-sumber yang semakin terbatas. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan masyarakat yang pluralistis, dimana antar hubungan lebih banyak diatur berdasarkan pembagian kerja. Mereka mulai mengadakan kompromi dan pembagian yang memberikan ruang hidup kepada jumlah orang yang lebih besar

Permukiman kumuh dan padat Kampung Rawa khususnya bagian barat dihuni oleh penduduk pendatang dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Sunda (Kuningan, Sukabumi, Serang, Banten), Jawa, Sumatra dan daerah lain di Indonesia. Terbangunnya komunitas yang saling membantu diduga disebabkan para penduduk pendatang masih membawa sistem sosial budaya daerahnya masing-masing, seperti nilai-nilai agama, gotong royong, musyawarah dan adat

istiadat yang memiliki kesamaan universal dan telah menjadi kekuatan (modal sosial) dalam membangun masyarakat yang utuh.

Permukiman kumuh dan padat peranan etnik dan kekerabatan itu diaktifkan oleh para pelakunya dan menonjol untuk adaptasi dan mobilitas dalam kehidupan perkotaan, baik bagi para pendatang baru maupun bagi mereka yang sudah mapan kehidupannya di kota. Struktur relasi dan jaringan sosial permukiman kumuh dan padat Kampung Rawa menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi warganya.

Kompleksitas struktur kehidupan ekonomi perkotaan ini mempengaruhi terwujudnya kompleksitas dalam struktur sosial perkotaan. Sistem pelapisan sosial terbentuk berdasarkan atas macam pekerjaan dan pendapatan yang coraknya sangat kompleks. Karena kompleksitas sistem pelapisan sosial tersebut tergantung dari tingkat perkembangan kota dan kedudukan dalam sistem administrasi negara (Arensberg, 1968;Uzell dan Provencher,1976). Kemudian pelapisan terjadi berdasarkan suku-bangsa/etnik, walaupun tidak terstruktur dalam administrasi negara, tapi lebih menunjukkan keberagaman yang terajut dalam kebersamaan hidup (ikatan sosial) membaur dalam satu wilayah komunitas.

Kehidupan sosial antar warga yang terbangun di Kampung Rawa Barat memiliki tingkat dinamika yang tinggi tercermin dari interaksi-interaksi yang terjadi di dalam rumah tangga ataupun hubungan ketetanggaan. Tingkat kepadatan interaksi antar warga memunculkan pameo “*siang malam gak ada matinya*”¹². Kehidupan warga permukiman kumuh dan padat terjadi siang malam dikarenakan daya tampung dan dukung dalam rumah tangga sudah menurun sehingga setiap rumah tangga harus menerapkan sistem *shift-shiftan* (bergiliran) dalam melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang-ruang (istirahat) sehingga anggota keluarga yang tidak memanfaatkan ruang-ruang lebih memilih melakukan aktifitasnya di luar rumah.

¹² Mobilitas kehidupan kehidupan warganya sangat tinggi yang berlangsung siang dan malam yang dilakukan diluar rumah dengan memanfaatkan ruang-ruang kosong seperti pos RW, teras rumah, gang, warung dll sehingga malam sampai dini hari-pun terlihat ramai oleh aktifitas warga pemukiman yang tidak mendapatkan tempat istirahat di rumahnya masing-masing. Selanjutnya pada pagi hari anggota keluarga yang malam harinya tidak tidur memanfaatkan istirahatnya pada pagi hari ketika anggota keluarga lainnya melakukan aktifitasnya pada pagi sampai sore harinya.

Hubungan sosiabilitas antar warga dibentuk dari interaksi-interaksi spontan warga dominan dilakukan di luar rumah dengan memanfaatkan ruang-ruang yang tersisa seperti jalan, gang, ataupun bangku-bangku yang berada di warung kios. Prosentase intensifikasi hubungan sosiabilitas antar warga tercermin dari jawaban responden dibawah ini.

Tabel.4.13

Intensitas hubungan antar warga

Intensitas hubungan antar warga	Kerabat	Tetangga RT/RW	Warga diluar pemukiman	Instansi pemerintah/ org.sosial
Tidak pernah	25.9	10.1	33.1	24.5
Kadang	33.1	30.9	43.9	31.7
Sering	25.2	36.0	14.4	27.3
Sangat sering	15.8	23.0	8.6	16.5

Sumber : Data empiris peneliti

Hubungan sosiabilitas antar warga di Kampung Rawa mencerminkan pola ikatan sosial dan hubungan resiprokal yang kuat. Tingkat keakraban antar warga digambarkan dengan bervariasinya interaksi antar warga dalam komunitas spasial. Kedekatan secara spasial saling berperan dalam memberikan akses yang sama, menghabiskan waktu bersama dan dapat menimbulkan kesamaan kepentingan. Tinggal berdekatan secara signifikan meningkatkan durasi, frekuensi, berbagi norma dan mempererat ikatan antar tetangga.

Pola hubungan sosial sehari-hari warga permukiman Kampung Rawa mencerminkan ada rasa kekeluargaan di lingkungan permukiman secara berdekatan dan terpelihara. Meskipun terpisah oleh sarana jalan raya yang dijadikan lalu lintas angkutan umum jurusan senen-kampung melayu namun interaksi sosial antar warga “sering” dilakukan dalam satu komunitas RT/RW (36%) dapat dikategorikan “rendah”. Sedangkan banyaknya warga yang melakukan interaksi dengan warga luar permukiman (43.9%) memperlihatkan hubungan sosial lebih banyak dilakukan di luar permukiman. Dan “kadang” dalam sebulan melakukan interaksi dengan pihak birokrasi kelurahan (31,7%). Beragamnya interaksi sosial yang dilakukan warga merupakan pengaruh mobilitas

kerja dan tingkat kepadatan interaksi sosial yang tinggi dilakukan di luar dan dalam komunitas permukiman per harinya. Untuk itu keragaman jaringan sosial yang kuat seperti akan membantu memudahkan warga dalam memecahkan berbagai persoalan sehari-hari di lingkungan.

Terbangunnya hubungan sosiabilitas antara warga dengan institusi kelurahan merupakan wujud dari terbentuknya sistem pemerintahan yang baik. Upaya-upaya institusi kelurahan menjangkau dan menyerap aspirasi warga melalui wadah-wadah sosial yang terbentuk juga berjalan, begitupun sebaliknya kebutuhan warga akan mendapatkan pelayanan hak-haknya dan menyampaikan aspirasinya selalu mendapatkan saluran yang baik. Relasi sosial yang terbentuk merupakan upaya untuk mengikis kesenjangan hubungan antara institusi kelurahan dengan warga, memperkuat ikatan sosial dalam satu kesatuan komunitas sehingga terwujud lingkungan komunitas yang harmonis.

Interaksi sosial merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena interaksi sosial antar warga di permukiman merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial, seperti dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya (Soekanto, 1996). Apabila interaksi sosial tidak berjalan dengan baik, maka memungkinkan terjadinya disintegrasi dalam kehidupan masyarakat pada akhirnya menghambat proses sosial itu sendiri. Dengan terjadinya interaksi yang baik maka aspek integrasi memungkinkan akan tercapai (Parson dalam Jhonson, 1990).

4.3.1 Kehidupan Kelompok dan Jaringan sosial Komunitas

Sesungguhnya komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau letak wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya. Dengan demikian struktur

masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam meninjau kapasitas dan potensi komunitas.

Jelas bahwa Kampung Rawa Barat memiliki struktur masyarakat yang bersifat heterogen sehingga semakin banyak kepentingan komunitas yang harus diakomodasi dalam sebuah proses pembangunan. Kepentingan bersama jelas akan lebih mudah untuk dicapai apabila terdapat unsur yang menjadi pengikat suatu komunitas. Biasanya komunitas yang terbentuk secara alamiah baik yang dibentuk oleh nilai budaya, sosial dan ekonomi memiliki daya gerak yang jauh lebih kuat dibandingkan komunitas yang dibentuk oleh ikatan-ikatan formal seperti wilayah, ideologi politik, serta atribut-atribut administratif lainnya.

Memahami kelompok dan jaringan sosial di permukiman kumuh dan padat Kampung Rawa Barat, untuk mengakses sumberdaya dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama adalah bagian penting konsep modal sosial. Maka dalam deskripsi dibawah ini akan menggambarkan Kelompok dan Jaringan sosial yang terbangun di permukiman kumuh Kampung Rawa Barat yang tersebar di RW 01, RW 02, RW 06 dan RW 08.

Heterogenitas kehidupan sosial ekonomi kawasan permukiman kumuh dan padat selalu berpengaruh terhadap heterogenitas terbangunnya jaringan sosial antar warga. Akibatnya derajat kepadatan jaringan sosial sangat tinggi baik bersifat informal maupun formal dapat terlembagakan dalam bentuk kelompok sosial. Kelompok sosial ini hidup dalam dinamika padatnya kehidupan sosial ekonomi dan budaya di Kampung Rawa Barat.

Tabel 4.14.

Hubungan sosial antar warga

Hubungan Sosial	Frekuensi	Percent
Kerabat di pemukiman	16	11.5
Tetangga satu RT/RW	52	37.5
Warga diluar pemukiman	39	28.1
Ins.Kelurahan dan Org.Sos	32	23.0
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Terbentuknya jaringan sosial tercermin dari hubungan sosial sebesar 37.4 persen dilakukan antar tetangga dalam satu lingkungan RT/RW. Kemudian 28.1 persen dilakukan dengan warga diluar permukiman, sementara 23 persen dilakukan institusi kelurahan dan organisasi sosial serta sedikit sekali dilakukan bersama kerabat yang ada dilingkungan permukiman. Interaksi sosial yang terbangun dalam komunitas masih mencerminkan posisi kedekatan secara fisik dalam ruang spasial. Kedekatan dan keakraban yang terbentuk mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mereka bawa dari daerah asal dalam menghidupkan komunitas-komunitas kawasan permukiman dengan melakukan pembauran bersama komunitas lainnya.

Berdasarkan jawaban responden di atas, pola interaksi sosial antar warga terbentuk didasarkan pada hubungan pertalian perkerabatan, ikatan primordial kedaerahan dalam satu komunitas. Hubungan perkerabatan merupakan manifestasi nilai-nilai etnisitas, budaya dan sosial daerah asalnya yang terbawa di kehidupan perkotaan. Corak kehidupan semacam inilah yang dominan di lingkungan permukiman kumuh dan padat Kampung Rawa Barat. Sementara, sempitnya ruang spasial kehidupan warga menyebabkan jangkauan ataupun interaksi sosial antar warga dalam satu lingkungan RT/RW sangat mudah dilakukan.

Keragaman dan kepadatan interaksi antar warga dan birokrasi kelurahan merupakan cerminan dari ketiadaan ruang spasial yang mengharuskan hubungan tiada batas, profesi ataupun status sosial ekonomi. Kepadatan jaringan ini mencerminkan bantuan sosial untuk mengatasi kesulitan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, artinya bahwa jaringan sosial semacam ini menjadi modal ketahanan ekonomi sosial kawasan permukiman kumuh.

Terbangunnya jaringan sosial di lingkungan permukiman kumuh dan padat dapat membentuk kelompok atau komunitas sosial dalam memperkuat modal sosial antar warga. Kuatnya ikatan sosial antar warga dalam satu komunitas dapat meningkatkan kapasitas individu-individu dalam memecahkan berbagai macam persoalan sehari-hari.

Bangunan ikatan sosial dalam jaringan sosial bertumpu pada kedekatan lokasi, fisik, emosional dan sosial. Frekuensi interaksi sosial mendorong

terbentuknya komunitas baru yang terlembagakan dalam jaringan sosial yang terbentuk secara alamiah berbentuk komunitas atau kelompok sosial¹³. Interaksi antar warga yang terlembagakan dalam komunitas ataupun kelompok merupakan cerminan kualitas jaringan sosial di permukiman kumuh dan padat dengan meneguhkan norma-norma yang ada.

Di permukiman kumuh dan padat dapat ditemukan dua macam kelompok sosial yang dikelompokkan menurut proses pembentukannya. Pertama adalah kelompok yang didasari atas relasi sosial yang terbangun antar warga secara sukarela, hidup secara mandiri di sebut kelompok alamiah (*bottom up*). Kedua adalah kelompok yang didasari atas relasi yang terbangun antara institusi kelurahan dengan warga dalam rangka menjangkau dan mengikis kesenjangan hubungan di sebut kelompok rekayasa (*top down*). Kedua kelompok ini hidup dalam dinamika kehidupan warga di permukiman kumuh dan padat.

Di permukiman kumuh dan padat kelompok yang termasuk dalam kategori *bottom up*, bekerja di unit-unit RT/RW secara sosial dan mandiri. Kelompok ini tumbuh dalam ikatan sosial yang bersifat formal dan informal dan bersifat keagamaan. Komunitas spasial yang bersifat primordial keagamaan yaitu , pertama kelompok ini membentuk struktur komunitas sosial yaitu Majelis Ta'lim atau Pengajian. Majelis Ta'lim bekerja dalam lingkungan yang memiliki tempat-tempat ibadah seperti masjid dan mushola, beranggotakan dari kelompok ibu, bapak dan remaja. Jadi di wilayah RT ataupun RW secara pasti memiliki forum Majelis Ta'lim. Frekuensi pertemuan kelompok-kelompok Majelis Ta'lim dilakukan satu sampai dua kali dalam seminggu dengan berbagai kegiatan bersama seperti pengajian, mengajar kitab dengan tingkat partisipasi cukup tinggi ditunjukkan oleh kelompok ibu dan bapak. Perkumpulan ini tidak hanya sebagai

¹³ Kelembagaan yang terbentuk secara alamiah, bermula dari pematangan suatu norma, sebagai bagian pokoknya. Suatu norma akan terbentuk secara bertahap mulai dari cara berperilaku (*usage*), meningkat menjadi kebiasaan (*folkways*), menjadi tata kelakuan (*mores*), dan mantap ketika menjadi *custom* (Koentjaraningrat, 1997).

Inilah yang disebut dengan proses pelembagaan (*institutionalization*), yaitu proses yang dialami norma baru untuk menjadi bagian dari kelembagaan. Jadi suatu norma dikatakan telah melembaga apabila telah diketahui, difahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai, sampai terjadi *internalized*, yaitu ketika norma-norma tersebut telah mendarah daging.

wadah melakukan kegiatan keagamaan akan tetapi merupakan sarana ajang sosialisasi dan pergaulan.

Kedua adalah komunitas primordial etnis yaitu di wilayah RW 02 terdapat komunitas “Orang Jawa” berada di Pasar Gembrong juga membangun ikatan sosialnya dalam kelompok pengajian bersama. Kelompok ini secara sukarela dan mandiri membentuk kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan yang disertai dengan Arisan anggota dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah anggota. Frekuensi kegiatan pengajian antar anggota dilakukan secara berkala satu minggu sekali (malam jumat). Interaksi sosial komunitas “Orang Jawa” yang terbangun merupakan kelanjutan tradisi budaya Jawa daerah asal yang memiliki kesamaan dalam membentuk budaya kebersamaan. Pengajian semacam ini dapat menggambarkan tentang tingginya derajat solidaritas dan kebersamaan warga khususnya etnis Jawa di Kampung Rawa Barat. Walaupun hidup dalam komunitas yang lebih heterogen, kelompok “Orang Jawa” juga tidak membatasi pada anggotanya untuk melakukan hubungan sosiabilitas dengan etnis ataupun kelompok lainnya.

Ketiga, komunitas primordial etnis yang tidak terstruktur namun memiliki wilayah kerja adalah kelompok etnis betawi yaitu FBR, Forkabi, POB. Kelompok ini tidak membatasi keanggotaan dari unsur etnisitas betawi tetapi lebih bersifat umum. Mereka bekerja dalam jangkauan sebatas anggota komunitas dan tidak memiliki aktifitas rutin dalam lingkungan permukiman Kampung Rawa Barat, namun struktur dan kinerjanya lebih bersifat keluar lingkungan permukiman. Jenis kegiatan yang cenderung memiliki unsur-unsur keagamaan seperti Pengajian dan sebagian kecil cenderung memiliki unsur-unsur yang berhubungan dengan faktor keamanan.

Masyarakat permukiman kumuh dan padat di Kampung Rawa Barat memiliki kultur yang menjunjung tinggi nilai-ajaran Islam, hal ini tercermin dari kehidupan sehari-hari mereka. Budaya Islam yang tampak dari masyarakat adalah banyaknya tempat ibadah seperti mushola dan masjid yang ada di sekitar permukiman bahkan di dalam gang sempitpun dapat ditemui tempat untuk beribadah. Dan juga aktifitas kegiatan warga cenderung dalam kehidupan agamis seperti pengajian, majelis dzikir, dan marawis.

Kemudian kelompok yang termasuk dalam kategori rekayasa atau *top down* yang terlembagakan dalam struktur formal administrasi kelurahan yang dibentuk berdasarkan arahan dan program pemerintahan (*top down*) dalam bentuk kelompok atau komunitas merupakan prasyarat terbentuknya ikatan-ikatan sosial yang kuat. Kelompok ini merupakan saluran komunikasi formal dan wadah untuk mengikis kesenjangan hubungan antar warga dan institusi kelurahan sehingga kemacetan, kebuntutan relasi dapat teratasi.

Saluran-saluran formal ini berbentuk kelompok sosial dan bekerja sebagai *mitra-partnership* birokrasi kelurahan dalam menyerap aspirasi ataupun melakukan pemerataan pembangunan. Kelompok sosial ini bekerja dalam ranah membantu menyukseskan program pembangunan di permukiman sehingga keterbatasan jangkauan pelayanan birokrasi kelurahan dapat terbantuan.

Berdasarkan wawancara khusus dengan informan, saluran formal tersebut antara lain berbentuk komunitas spasial, pertama Dewan Kelurahan (Dekel) merupakan mitra kerja kelurahan beranggotakan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan warga di unit-unit RW/RT yang berfungsi untuk menampung aspirasi warga. Kepengurusan di pilih secara demokratis dengan sifat keanggotaannya mengikat dan bekerja karena adanya program-program kelurahan. Interaksi antar anggota hanya berjalan tiga bulan sekali, dan belum mampu merumuskan program-program yang sistematis dalam memperbaiki lingkungan permukiman.

Kedua di kalangan remaja, saluran formal terlembagakan dalam kelompok Karang Taruna dalam wilayah kelurahan dengan sistem keanggotaan dari remaja-remaja di unit RT/RW. Kepengurusan di pilih secara musyawarah dan keanggotaannya bersifat mengikat dan bekerja karena program-program kelurahan. Saluran ini tidak berjalan secara efektif dikarenakan ketiadaan program yang pasti dikarenakan disfungsi strukturnya dan intensitas interaksi antar anggota dalam pertemuan terjadi ketika ada hari besar nasional ataupun hari-hari besar keagamaan.

Ketiga, di kalangan ibu-ibu terbentuk kelompok penggerak PKK, organisasi gender yang dapat menyalurkan kegiatan ibu-ibu dan paling aktif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kelompok PKK terstruktur dalam

administrasi kelurahan, keanggotaannya bersifat mengikat dan kepengurusan dari perwakilan dari setiap tingkatan RT/RW. Interaksi sosial antar anggota dan warga terbangun cukup kuat yang ditunjukkan dalam rutinnnya melakukan intensitas pertemuan selama 1 bulan sekali per lingkungan RW dengan bentuk kegiatan seperti posyandu keliling yang difasilitasi puskesmas dengan program imunisasi balita, pengawasan Jumantik (juru pemantau jentik nyamuk) di setiap rumah warga dan Arisan ibu-ibu anggota PKK merupakan wadah interaksi antar warga dalam membangun relasi sosial yang lebih kuat.

Interaksi pengurus PKK dengan warga bekerja secara regular melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bergiliran. Posyandu menjembatani pelayanan kesehatan ibu-anak yang dilakukan secara berkeliling di lingkungan komunitas sehingga kesehatan warga khususnya ibu-anak dapat terpantau dengan mudah. Kemudian program Jumantik, merupakan salah satu sarana institusi kelurahan untuk mengontrol kesehatan warganya melalui pengawasan terhadap jentik nyamuk disetiap rumah-rumah secara regular. Dan pembangunan kehidupan ekonomi warganya dibangun dengan memberdayakan kegiatan Arisan warga dalam rangka untuk membangun komunikasi dan memperkuat kebersamaan dalam lingkungan komunitas.

Keempat, saluran formal dalam rangka mengurai ketegangan-ketegangan antar warga atas tindakan kerusuhan/kriminalitas baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal permukiman yang sangat sering terjadi di Kampung Rawa Barat mendapat muaranya ketika terbentuknya kelompok FAKTA (Forum Anti Kerusuhan Antar Warga) pada tahun 2002. Keinginan warga membentuk komunitas spasial bersama dalam rangka mengurai ketegangan antar warga merupakan bentuk dan peningkatan kesadaran berkumpul dan berserikat membentuk wadah bersama.

Kepengurusannya di pilih dengan melakukan musyawarah warga dan keanggotaannya bersifat mengikat. FAKTA memiliki struktur dan beranggotakan tokoh masyarakat, agama dan warga yang ada di lingkungan permukiman. Upaya melibatkan unsur tokoh masyarakat dan agama merupakan strategi untuk mengedepankan penggunaan hukum sosial dan budaya yang melekat di lingkungan komunitas daripada hukum positif negara. Tokoh agama dan tokoh

masyarakat yang memiliki pengaruh dan pengalaman dalam proses pertumbuhan permukiman menjadi tumpuan dalam meminta pertimbangan warga dalam memutuskan penyelesaian kerusuhan antar warga. Status dan peran yang cukup strategis dalam penyelesaian kerusuhan antar warga, tokoh agama dan masyarakat mendapat perlakuan khusus dalam kehidupan di lingkungan permukiman dibandingkan dengan warga biasa.

Secara intensif setiap tiga bulan sekali melakukan musyawarah besar dengan tingkat partisipasi cukup tinggi, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadinya pertemuan yang bersifat insidental. Keberadaan FAKTA cukup membantu warga dalam mengurai ketegangan-ketegangan yang sangat sering terjadi. Prinsip kerja FAKTA adalah mengurai akar kerusuhan dengan mengelola atau memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat ataupun pihak-pihak orang tua menjadi anggota. Maka ketika terjadi kerusuhan antar warga dengan mudah dapat dideteksi provokatornya dan diselesaikan secara kekeluargaan.

4.3.2. Kepercayaan dan Solidaritas Sosial Kawasan

Merujuk pada bagaimana mempercayai relasi, tetangga, kolega, kenalan, dan bahkan orang asing, baik untuk membantu atau (setidaknya) tidak mengganggu mereka. Dalam konteks sosial, kepercayaan merupakan syarat memahami rumitnya hubungan antar manusia. Kepercayaan mencerminkan pentingnya ketergantungan yang didasari hubungan yang sudah terjalin atau jaringan yang sudah dikenal. Membedakan kedua perbedaan dalam satu kesatuan penting untuk memahami cakupan hubungan sosial masyarakat dan kemampuan hubungan ini untuk menanggulangi kesulitan atau keadaan yang berubah dengan cepat.

Kepercayaan adalah aspek paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, dimana individu memiliki peranan yang penting dalam melakukan interaksi sosial. Individu secara berlanjut akan memberikan definisi dirinya kepada orang lain, bila orang lain tidak dapat menerima definisi individu maka ia tidak akan melakukan interaksi atas dasar batasan yang diberikan dan situasi yang menunjukkan tidak adanya kepercayaan.

Kepercayaan sosial merupakan salah satu bagian penting modal sosial. Tanpa kepercayaan orang sulit untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain,

apalagi hubungan kerjasama. Dalam konstruksi tatanan sosial perkembangan dari hubungan sosial yang stabil atau permanen menumbuhkan kepercayaan yang bersifat timbal balik antar aktor sosial. Dalam kehidupan masyarakat permukiman kumuh Kampung Rawa Barat, kepercayaan tumbuh dan berkembang dalam pola hubungan antar warga bersifat kekeluargaan, hubungan kekerabatan dan hubungan yang menekankan kepercayaan terhadap institusi yang dilakukan sehari-hari secara intensif.

Pola hubungan antar warga merupakan potensi dalam memobilisasi dan meningkatkan modal sosial. Derajat kepercayaan antar warga kurang kuat di tunjukkan 36.7% responden menjawab tetangga satu RT/RW, sedangkan 25.2% responden terhadap institusi kelurahan dan organisasi sosial, sementara sedikit responden yang percaya terhadap kerabatnya atau sedikit sekali responden yang percaya terhadap warga diluar permukiman. Gambaran ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang tumbuh merupakan dampak dari jejaring sosial yang terbangun untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.

Tabel 4.15.

Siapa yang dapat dipercaya

Siapa yang dapat dipercaya	Frekuensi	%
Kerabat dipemukiman	29	20.9
Tetangga satu RT/RW	51	36.7
Warga diluar pemukiman	24	17.3
Institusi kelurahan dan org.sosial	35	25.2
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Ukuran-ukuran kepercayaan antar warga tercermin dari hubungan timbal balik yang saling menguntungkan yang dilandasi oleh perilaku yang baik (30.9%), suka menolong (28.8%) dan sedikit responden yang menyatakan karena alasan satu kerabat ataupun taat beribadah.

Tabel 4.16.

Alasan percaya pada warga

Alasan percaya pada warga	Frekuensi	%
Masih kerabat	31	22.3
Suka menolong	40	28.8
Berperilaku baik	43	30.9
Taat beribadah	25	18.0
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Jawaban-jawaban responden yang bervariasi menggambarkan bahwa nilai-nilai dasar kepercayaan berupa norma, kultur (berperilaku baik, budaya tolong menolong, taat beribadah) daerah asalnya selalu melekat dalam individu-individu dalam melakukan relasi sosial antar warga di Kampung Rawa Barat. Ini memberikan gambaran bahwa kepercayaan tumbuh didasari tidak hanya satu penilaian akan tetapi sangat kompleks berdasarkan pada berperilaku baik, suka menolong, masih dalam satu kerabat dan taat beribadah. Tetapi indikator ini bekerja secara simultan dalam mengukur tingkat kepercayaan warga. Nilai-nilai budaya yang terbawa dari daerah asal inilah yang mendasari hubungan antar warga dalam melakukan kegiatan bersama semakin kuat.

Tabel 4.17.

Alasan percaya pada institusi kelurahan dan organisasi sosial

Alasan percaya pada warga	Frekuensi	%
Memberikan pelayanan	12	8.6
Memberikan informasi	41	29.5
Membantu yang terkena musibah	54	38.8
Sering turun langsung ke warga	32	23.0
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Sementara, dalam masyarakat perkotaan kepercayaan sosial juga terbangun dalam saluran formal dengan menekankan pada institusi kelurahan dan

organisasi sosial yang berada di permukiman Kampung Rawa Barat. Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa kepercayaan sosial warga terhadap institusi kelurahan dan organisasi sosial ditunjukkan dengan 38.8% responden menjawab membantu warga yang terkena musibah, 29.5% responden menjawab institusi kelurahan dan organisasi sosial memberikan informasi yang sebenarnya tentang lingkungan.

Hubungan warga dengan insitusi kelurahan dan organisasi sosial masih didasarkan asas manfaat bersama (*mutual benefit*), yaitu kepercayaan timbul ketika terjadi proses saling menguntungkan antar warga dengan institusi kelurahan dan organisasi sosial di lingkungan permukiman. Begitupun sebaliknya, ketika institusi kelurahan dan organisasi sosial tidak lagi memberikan manfaat terhadap warga, tentunya kepercayaan itupun mulai memudar. Oleh karenanya upaya-upaya pendekatan-pendekatan institusi kelurahan Kampung Rawa dengan berbagai instrument pendukungnya seperti Forum warga RT/RW, Karang Taruna, PKK, Dekel, FAKTA) dan kegiatannya adalah dalam rangka membangun kepercayaan sehingga penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dapat berjalan secara efektif dan mendapat dukungan dari warga secara luas.

Solidaritas sebagai perekat hubungan sosial antar warga merupakan inti dari berkembangnya kepercayaan sosial. Menurut Durkheim (dalam Lawang, 1994:181) menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Kedekatan secara fisik dan sosial permukiman Kampung Rawa Barat dapat meningkatkan nilai-nilai solidaritas sosial antar warga. Secara sederhana mengukur tingkat solidaritas warga didasarkan pada bentuk bantuan yang pernah diberikan kepada tetangga di lingkunganpermukiman. Sebanyak 56.1% responden menyatakan bentuk bantuan “tenaga” mencerminkan ke-aktifan dan kedekatan

secara fisik dan sosial “cukup tinggi”. Besarnya bantuan tenaga adalah bentuk dari banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh warga permukiman ataupun hampir semua kegiatan warga sering dilakukan di dalam komunitas spasial. Sedangkan 27.3% responden menyatakan “uang” dan sedikit sekali yang menyatakan “waktu dan ide/pikiran” menggambarkan kepasifan dan kedekatan dalam membantu warga relatif rendah.

Tabel 4.18.

Bentuk Bantuan Warga

Bentuk Bantuan Warga	Frekuensi	%
Waktu	14	10.1
Tenaga	78	56.1
Uang	38	27.3
Pikiran/ide	9	6.5
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Sedangkah intensitas bantuan dalam sebulan terjadi di permukiman Kampung Rawa Barat ditunjukkan 61.9% responden menjawab kadang-kadang dan 20.1% responden menjawab sering dapat dikategorikan tingkat solidaritas antar warga “rendah” dan sedikit sekali yang menyatakan sering dan tidak pernah sama sekali dapat dikategorikan memiliki solidaritas “rendah”. Kondisi ini memperlihatkan sifat solidaritas sosial antar warga bekerja “cukup tinggi” sehingga dapat mencerminkan bentuk kerjasama yang terbangun di permukiman.

Tabel 4.19.

Intensitas Bantuan Warga

Intensitas Bantuan Warga	Frekuensi	%
Tidak pernah	17	12.2
Kadang-kadang	86	61.9
Sering	28	20.1
Sangat sering	3	2.2
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Rasa kepercayaan dan kebersamaan antar tetangga terjadi dalam satu lingkungan RT/RW. Kedekatan secara fisik dan unit administrasi RT/RW menjadikan rasa solidaritas sosial muncul dalam satu persamaan kepentingan dan terwadahi dalam kelompok sosial akar rumput berbentuk kegiatan bersama.

Adanya perubahan sosial yang begitu pesat dalam dekade akhir-akhir ini, mengakibatkan adanya pergeseran nilai budaya masyarakat; sebagai dampak dari kemajuan ekonomi, teknologi, dan informasi. Pertumbuhan ekonomi di permukiman kumuh dan padat, berpengaruh terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial mengalami penurunan dan kurang lagi dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam masyarakat kota solidaritas bersifat organik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pola solidaritas yang terbangun antar warga ketika memiliki urusan yang bersifat kemanusiaan, namun ketika hal tersebut bersangkutan dengan lingkungan sekitar yang lebih luas, solidaritas itu selalu digerakkan oleh kelompok sosial ataupun institusi kelurahan.

Jika rasa percaya (*trust*) tumbuh dan berkembang melintasi batas-batas budaya lokal, kemungkinan besar semangat membangun bersama akan lebih kuat. Perilaku yang bersifat destruktif muncul dari masyarakat yang kehilangan *trust* akan dapat dikurangi. Jalannya pemerintahan akan lebih efektif. Pembangunan pun dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

4.3.3. Tindakan Sosial dan Kerjasama Komunitas

Kegiatan bersama di Kampung Rawa terbatas pada program pemerintah yang di lakukan di tingkat subkomunitas RT/RW, seperti penyelenggaraan keamanan, posyandu/pin kesehatan, kebersihan lingkungan dan perayaan hari-hari besar nasional, keagamaan, dan arisan warga. Pada umumnya yang berkaitan dengan keamanan di dampingi kelompok FAKTA, kesehatan didampingi oleh kelompok penggerak PKK, pemuda karang taruna dan remaja masjid juga mendampingi kegiatan kebersihan lingkungan. Kegiatan bersama warga permukiman merupakan sarana untuk melakukan tatap muka dan sosialisasi antar warga dengan institusi kelurahan ditengah kesibukan warga dalam mencari

nafkah. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden, partisipasi warga dalam berbagai macam kegiatan di lingkungan tercermin dalam tabel berikut :

Tabel 4.20.
Intensitas Kegiatan Sosial Warga

Kegiatan Sosial Warga	Frekuensi	%
Tidak pernah	19	13.6
Kadang-kadang	62	44.3
Sering	55	39.3
Sangat sering	3	2.1
Total	138	99.3

Sumber : Data empiris peneliti

Kegiatan sosial yang menjadi program kelurahan dan dikerjakan di unit-unit RT/RW meliputi kerja bakti yang dilakukan secara regular selama delapan minggu sekali, iuran kebersihan dan keamanan lingkungan selama satu bulan sekali yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan warga, kesehatan lingkungan selama satu bulan sekali, santunan anak yatim setahun sekali, santunan kepada warga yang mengalami musibah lebih bersifat insidental¹⁴.

Frekuensi partisipasi warga dalam kegiatan sosial di lingkungan permukiman secara umum dapat dikategorikan cenderung “tinggi”. 44.3% responden menyatakan kadang-kadang terlibat dalam kegiatan sosial, sementara 39.3% responden sering terlibat dalam kegiatan sosial. Sebaliknya sedikit sekali responden menyatakan sangat sering dan tidak pernah sama sekali dalam kegiatan sosial mencerminkan kepasifan dalam kegiatan sosial antar warga.

¹⁴ Santunan yang bersifat insidental seperti kematian diberikan kepada keluarga meninggal untuk membantu pengurusan dalam mempersiapkan pemakaman dengan besaran berkisar antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- yang diperoleh dari iuran bulanan warga permukiman yang dikordinir oleh RT/RW.

Sementara untuk santunan anak yatim di permukiman di setiap RW sebesar Rp. 200.000,-/orang diperoleh dari bantuan sukarela warga permukiman dan Khusus RW 01 bantuan biaya sekolah (transportasi dll) untuk SD berkisar Rp. 20.000,-/bulan dan SMP berkisar Rp. 40.000,-/bulan. Iuran kebersihan dan keamanan di pungut dari warga di setiap RT/RW berkisar Rp. 2000/kk – Rp.3000/kk yang di koordinir oleh petugas RT/RW.

Untuk Kesehatan warga khususnya posyandu dilakukan setiap bulan sekali, sedangkan di RW 08 sejak 2006 menerapkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warganya yang dilakukan dua kali dalam setahun dengan nama Rukun Kesehatan Swadaya Masyarakat.

Tabel 4.21.

Intensitas Kegiatan Keagamaan

Intensitas Kegiatan Keagamaan	Frekuensi	%
Tidak pernah	24	17.1
Kadang-kadang	40	28.6
Sering	51	36.4
Sangat sering	24	17.1
Total	138	99.3

Sumber : Data empiris peneliti

Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan warga adalah pengajian, ceramah agama dan dilakukan satu sampai dua kali dalam seminggu di masing-masing komunitas majelis taklim atau pengajian. Partisipasi warga dalam kegiatan bersama dalam bidang keagamaan sangat bervariasi dan dapat dikategorikan memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Di gambarkan 36.4 persen responden menjawab “sering”, 28.6 persen responden menjawab “kadang-kadang”. Sementara cukup sedikit responden menyatakan sangat sering dan tidak pernah sama sekali dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan pengajian dalam komunitas spasial yang bersifat primordial keagamaan memiliki potensi untuk berkembang lebih besar khususnya kelompok ibu-ibu di permukiman.

Tabel 4.22.

Intensitas Kegiatan Arisan

Intensitas Kegiatan Arisan	Frekuensi	%
Tidak pernah	8	5.7
Kadang-kadang	27	19.3
Sering	73	52.1
Sangat sering	31	22.1
Total	138	99.3

Sumber : Data empiris peneliti

Bentuk kegiatan warga yang secara regular dilakukan adalah Arisan. Kelompok arisan lebih didominasi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Partisipasi warga tercermin dari banyaknya komunitas arisan warga dan anggotanya secara intensif setiap bulan sekali melakukan dimasing-masing komunitas, dari jawaban responden 52.1 persen memilih sering, 22.1 persen memilih sangat sering. Kegiatan arisan warga secara aktif dilakukan di RW 02 setiap tanggal 10 per bulan dan secara resmi juga mengundang pihak institusi kelurahan, sedangkan di masing-masing lingkungan juga mengadakan arisan warga, namun sebagai sub program dari kegiatan bersama warga seperti Posyandu dan pengajian.

Kegiatan arisan yang berkembang di permukiman dapat menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam satu komunitas bersama. Kebersamaan yang tumbuh didasari atas nilai saling percaya dalam mengelola, menjalankan kegiatan arisan bersama dapat pula mengatasi berbagai tuntutan ekonomi keluarga di kalangan anggotanya. Untuk itulah komunitas spasial arisan tumbuh dan berkembang sangat pesat sesuai dengan tuntutan kebutuhan warga permukiman.

Tabel 4.23.

Intensitas Kegiatan Keamanan

Intensitas Kegiatan Keamanan	Frekuensi	%
Tidak pernah	6	4.3
Kadang-kadang	41	29.3
Sering	39	27.9
Sangat sering	53	37.9
Total	139	99.3

Sumber : Data empiris peneliti

Partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan permukiman relatif cukup tercermin dari jawaban 37.9 persen responden menjawab sangat sering atau menurut peneliti dapat dikategorikan keaktifan warga dalam setiap harinya untuk menjaga lingkungan. Sementara 29.3 persen menjawab kadang-kadang, dan 27.9 persen responden menjawab sering.

Faktor kedekatan dan keakraban dalam satu kawasan permukiman kumuh dan padat menjadikan kekuatan modal sosial warga untuk saling bekerjasama dalam penjagaan ataupun pengawasan terhadap keamanan lingkungan. Ketika terjadi kerusuhan antar warga secara cepat dapat diketahui oleh warga lainnya dilingkungan permukiman, begitupun dengan penyelesaiannya.

Kerjasama antara dua individu atau lebih memiliki tujuan bersama yang di aplikasikan dalam bentuk tindakan bersama dengan memegang nilai-nilai yang disepakati secara bersama. Kerjasama merupakan dampak dari rasa kepercayaan yang terbangun di antara kedua orang atau lebih. Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4.29 diperoleh 38.1% menyatakan kerjasama dilakukan dengan tetangga satu RT/RW dan 25.2% responden menyatakan dilakukan bersama-sama dengan institusi kelurahan dan organisasi sosial. Sementara sisanya dilakukan oleh kerabat dan warga diluar permukiman. Jadi orientasi kerjasama yang dilakukan warga lebih banyak dilakukan di dalam komunitas permukiman tetapi juga memiliki jaringan kerjasama diluar komunitas permukiman. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pola kerjasama cenderung bersifat hubungan ekonomi/bisnis dan juga hubungan kemanusiaan seperti tolong menolong dalam hajatan.

Tabel 4.24.
Kerjasama Warga

Kerjasama Warga	Frekuensi	%
Kerabat di pemukiman	23	16.5
Tetangga satu RT/RW	53	38.1
Warga diluar pemukiman	28	20.1
Ins. Kelurahan dan Org. Sos	35	25.1
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Kerjasama yang harmonis dalam mengerjakan kegiatan pembangunan sosial dan gotong royong dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal dengan prinsip dasar *gotong royong*; yang terlihat dalam kegiatan kerja bakti untuk membersihkan sarana sosial yang dibutuhkan masyarakat. Program kerja bakti warga permukiman Kampung Rawa dilakukan di lingkungan

RW dan dilaksanakan setiap delapan minggu sekali. Karena kerja bakti lingkungan merupakan program bersama antara warga dan institusi kelurahan, tingkat partisipasi antar warga secara keseluruhan dengan prinsip gotong royong tersebut cukup tinggi. Selain itu, program kerja bakti juga dilakukan warga ketika menghadapi perayaan hari kemerdekaan atau hari-hari besar lainnya. Ini menunjukkan bahwa kesukarelaan warga dalam mengelola lingkungan masih bersifat organik, artinya bahwa kerja bakti atau tindakan bersama secara massal dapat dilakukan secara rutin atas intruksi/himbauan dari institusi kelurahan.

Musyawarah warga dalam memecahkan masalah kemasyarakatan; yang terlihat dari pertemuan-pertemuan warga di masing-masing RW secara formal dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sedangkan kegiatan pengajian terfasilitasi oleh Majelis Ta'lim dilakukan setiap minggu (sering disebut *mingguan*) antar warga, tokoh agama, tokoh masyarakat di masing-masing komunitasnya. Kegunaannya adalah untuk mendiskusikan kegiatan keagamaan dan menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan.

Saling menolong antar tetangga (kesetiakawanan sosial); yang terlihat dari spontanitas masyarakat dalam menolong anggota masyarakat lainnya yang terkena musibah (misal : sakit, meninggal, kecelakaan, kendaraan mogok, dll) atau dalam membantu perayaan khitanan, perkawinan, membangun rumah, dll. Adanya iuran bulanan untuk keamanan dan kebersihan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan warga, santunan sosial dana kematian/ kesehatan, santunan pada fakir miskin, dan kegiatan sosial lainnya; merupakan perwujudan kegiatan bersama warga yang dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam lingkungan permukiman. Adanya kerukunan dan solidaritas antar warga di permukiman yang termanifestasikan dalam bentuk kegiatan bersama merupakan upaya untuk membangun kekerabatan antar warga.

Dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan upaya untuk mempercepat kemajuan pembangunan kesejahteraan sosial, sesuai dengan peraturan dan kesepakatan bersama di masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan berbagai jenis dana sosial masyarakat setiap bulan di tingkat Rukun Tetangga/ Rukun Warga.

Kegiatan pengumpulan dana sosial masyarakat tersebut antara lain dana kebersihan/sampah, dana keamanan, dana kematian, dana pendukung kegiatan PKK, dan dana lainnya yang dikumpulkan secara insidental (misal : sumbangan HUT RI atau perayaan hari besar lainnya). Besar-kecilnya bentuk sumbangan warga sangat bervariasi tergantung dari kesepakatan dalam musyawarah antar warga. Kegiatan pengumpulan dana tersebut merupakan tradisi warga dan merupakan suatu upaya menggali potensi warga yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dalam lingkup terbatas (tingkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga). Secara keseluruhan, ada kecenderungan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi masyarakat, semakin besar nilai sumbangannya, pada kegiatan yang bersifat sosial maupun untuk dana kemasyarakatan lainnya.

Pola-pola tindakan bersama ataupun kerjasama yang bersifat sosial ataupun keagamaan yang dilakukan baik antar warga maupun dengan institusi kelurahan dan organisasi sosial yang terdapat di Kampung Rawa Barat dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan lebih didasari oleh kepentingan sosial ekonomi mereka.

4.3.4. Potensi Informasi dan Komunikasi Warga Permukiman Kumuh

Bentuk modal sosial yang penting adalah potensi informasi dan komunikasi yang melekat pada relasi-relasi sosial yang terbangun antar warga, informasi dan komunikasi penting untuk mendasari tindakan-tindakan bersama. Alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi adalah penggunaan relasi sosial yang dipertahankan untuk tujuan-tujuan tertentu. Meningkatnya akses terhadap informasi dan melakukan komunikasi merupakan satu mekanisme terpusat untuk membantu warga lemah/memperkuat suara mereka didalam mempengaruhi kesejahteraan (Bank Dunia, 2002a).

Kampung Rawa Barat berkembang mencerminkan tingkat kepadatan relasi sosial yang terbangun antar warga dalam komunitas. Relasi sosial yang terwujud antar warga tergantung dari seberapa jauh antar individu-individu melakukan

peran-peran sosial melalui pertukaran informasi. Berikut sumber-sumber informasi yang terdapat di lingkungan permukiman :

Tabel 4.25.
Sumber Informasi

Sumber Informasi	Frekuensi	%
Kerabat di pemukiman	3	2.2
Tetangga satu RT/RW	19	13.7
Media	66	47.5
Ins. Kelurahan dan Org. Sos	51	36.7
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Sebanyak 47.5 persen responden menjawab sumber informasi dari media baik cetak ataupun elektronik, kemudian 36.7 persen responden memilih sumber informasi dari institusi kelurahan dan organisasi sosial sedangkan 13.7 persen dari tetangga RT/RW dan sisanya dari kerabat. Ini menunjukkan bahwa Kampung Rawa Barat merupakan representasi daerah urban yang masyarakatnya memiliki karakter khas, yaitu lebih cepat mendapat akses informasi dan lebih terbuka terhadap informasi yang berkembang.

Sumber informasi yang dominan masuk di lingkungan permukiman kumuh masih terbatas pada sumber-sumber informasi yang bersifat formal dan sebagian kecil sumber informasi informal yang dihasilkan dari hubungan sosial antar warga. Bentuk informasi dan komunikasi antar warga akan terlihat jelas ketika relasi-relasi sosial tersebut terbangun dalam komunitas-komunitas bersama di lingkungan permukiman seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Ta'lim, Fakta dll, yakni sebagai wadah pemberdayaan serta simpul informasi dan komunikasi di tingkat lokal sehingga informasi tersebut dapat diketahui dan dikomunikasikan oleh warga secara luas.

Sementara kedekatan secara fisik dan administrasi dengan tingkat kepadatan yang tinggi dapat menggambarkan padatnya relasi sosial yang terbangun. Kepadatan relasi sosial antar warga baik yang dilakukan di dalam komunitas ataupun dengan warga di luar komunitas tentunya mencerminkan

tingkat kepadatan lalu lintas informasi dan komunikasi. Kepadatan komunikasi antar warga tergambar pada tabel 4.26 dibawah ini :

Tabel 4.26.
Intensitas Komunikasi antar Warga

Intensitas Komunikasi Warga	Frekuensi	%
Tidak pernah	1	0.7
Kadang-kadang	21	15.1
Sering	46	33.1
Sangat sering	71	51.1
Total	139	100

Sumber : Data empiris peneliti

Frekuensi komunikasi antar warga dapat digambarkan dari jawaban responden 51.1 persen menjawab sangat sering, 33.1 persen responden memilih sering, 15 persen responden menjawab kadang-kadang dan sisanya 0.7 persen tidak pernah. Gambaran ini menjelaskan bahwa intensifikasi komunikasi cukup tinggi terbangun atas dasar relasi sosial merupakan dampak dari faktor kedekatan dan keakraban baik secara fisik maupun administrasi lingkungan menandakan juga kedekatan secara sosial. Lalu lintas komunikasi yang padat belum tentu mencerminkan kualitas komunikasi antar warga, namun lebih pada penekanan pada topik dan hasil akhir dari relasi sosial yang terbangun dalam perbaikan lingkungan ataupun bersifat personaliti.

4.3.5. Kohesi Sosial dan Inklusi

Kohesi sosial dan Inklusi sosial lebih terfokus pada perjanjian ikatan-ikatan sosial dan potensinya untuk memasukkan atau mengeluarkan anggota komunitas. Kohesi sosial dan Inklusi dapat diperlihatkan melalui kegiatan-kegiatan komunitas di permukiman kumuh seperti upacara pernikahan, penguburan, atau melalui aktifitas-aktivitas lain yang meningkatkan solidaritas, memperkuat kohesi sosial, dan mengembangkan kesadaran kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya komunitas. Dengan kebersamaan, warga

akan melampaui batas-batas identitas formal dan situasional, bukan terhenti pada identitas orang perorangan atau kelompoknya.

Dikatakan pula oleh Koentjaraningrat (1992) bahwa nilai-nilai sosial budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di dalam hidupnya. Jika terjadi ketidakseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya dengan kaidah-kaidah, atau terjadi ketidakselarasan antara aspirasi-aspirasi dengan saluran untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal inilah yang merupakan gejala-gejala kriminalitas. Sebab setelah itu akan terjadi kelakuan-kelakuan menyimpang (*deviant behaviour*).

Warga permukiman Kampung Rawa Barat yang datang dari berbagai daerah, umumnya tinggal berkelompok dalam satuan kecil tidak terbatas pada wilayah administrasi. Secara kultur, kelompok urban yang datang ke kota tetap memegang erat persamaan sosial budaya. Dengan tetap memegang kultur daerah asal, antar anggota kelompok tersebut lahir sebuah ikatan serta perasaan, mereka adalah saudara. Dengan kata lain, unsur primordial merupakan perekat yang sangat kuat bagi kohesivitas sosial masyarakat urban.

Peranan kekuatan persatuan atau kohesivitas antar warga di Kampung Rawa Barat dengan memegang nilai-nilai budaya lokal sangatlah vital dalam pencapaian pembangunan lingkungan yang berkualitas. Tingkat kohesivitas warga permukiman menunjukkan kekuatan modal sosial masyarakat yang bersangkutan. Modal sosial merujuk pada kemampuan orang-orang untuk bekerja sama dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Tabel 4.27.

Kegiatan Bersama antar Warga

Kegiatan bersama antar warga	Frekuensi	%
Tidak pernah	15	10.8
Kadang-kadang	42	30.2
Sering	67	48.2
Sangat sering	15	10.8
Total	139	100

Sumber : Dara empiris peneliti

Tingkat kohesifitas warga permukiman Kampung Rawa Barat dapat ditunjukkan dengan melakukan aktifitas bersama untuk memupuk kebersamaan seperti bermain, rekreasi, olah raga bersama. Secara umum kebersamaan yang terbangun di pemukiman dapat dikategorikan cukup “tinggi”, dimana 48.2% responden menjawab sering melakukan aktifitas bersama warga, 30.2% responden memilih kadang-kadang dan sedikit sekali responden yang menyatakan tidak pernah dan sangat sering.

Terbangunnya kohesifitas antar warga dikarenakan pola hubungan yang didasarkan nilai-nilai budaya yang melekat dari masing-masing warga. Bahkan kohesifitas antar warga (*bounded solidarity*) dapat bekerja semakin kuat ketika komunitas di lingkungan permukiman kumuh dan padat terancam atau mendapat tekanan dari unsur luar ataupun pemerintahan. Dorongan responden membangun kebersamaan ditunjukkan dari tabel berikut :

Tabel 4.28.

Faktor Kebersamaan antar warga

Kebersamaan Antar Warga	Frekuensi	%
Satu kerabat	1	12.2
Persamaan etnis/suku	35	25.2
Persamaan keyakinan	31	22.3
Persamaan ekonomi-sosial	56	40.3
Total	139	100

Sumber : Dara empiris peneliti

Persamaan status ekonomi sosial masih berperan penting dalam membangun kebersamaan di permukiman kumuh dan padat (40.3%), sedangkan 25.2% responden membangun kebersamaan didasarkan pada persamaan etnis kesukuan, dan 22.3% responden memilih faktor agama juga penting dalam membangun kebersamaan dan sedikit sekali kebersamaan ditunjukkan dengan memilih satu kerabat keluarga. Warga permukiman lebih mudah dan terbiasa membangun kebersamaan yang dilandasi kesamaan ekonomi sosial sebagai bagian dari kesatuan sosial di permukiman kumuh. Kesamaan status ekonomi sosial tentunya menjelaskan pada kesatuan atau komunitas primordial etnis dalam

membentuk jaringan sosial bersama, karena permukiman Kampung Rawa merupakan “melting plot” dari berbagai daerah yang membentuk kesatuan hidup dan membaaur dalam budaya yang berbeda-beda.

Tabel 4.29.

Intensitas Konflik antar Warga

Intensitas Konflik antar Warga	Frekuensi	%
Tidak pernah	25	18.0
Kadang-kadang	57	41.0
Sering	38	27.3
Sangat sering	19	13.7
Total	139	100

Sumber : Dara empiris peneliti

Heterogenitas sosial ekonomi dan tingginya kepadatan hunian akan mencerminkan kerentanan sosial, seperti terjadinya konflik antar warga. Intensitas konflik yang terjadi di Kampung Rawa Barat ditunjukkan 41 % menjawab kadang-kadang, 27.3% responden memilih sering dan sedikit kecil responden menjawab sangat sering dan tidak pernah. Data ini dapat menjelaskan bahwa tingkat kepadatan secara fisik maupun administrasi penduduknya cukup rawan terjadinya tindakan-tindakan menyimpang warga, walaupun dalam permukiman sudah terbentuk Forum Anti Kerusuhan Antar Warga (FAKTA). Kerawanan tindak kerusuhan antar warga terjadi di RW 02, RW 06, RW 04, sedangkan kerawanan terjadinya pencurian di RW 07 dan RW 05.¹⁵

Tingginya tingkat kohesifitas antar warga Kampung Rawa Barat tidak menjamin tidak terjadinya “konflik” antar warga (responden menjawab sering dan kadang-kadang). Konflik antar warga terjadi karena konflik diluar permukiman terbawa masuk ke dalam lingkungan permukiman sehingga konflik tidak hanya melibatkan warga permukiman tapi juga warga diluar permukiman dan berlangsung relatif lama.

¹⁵ Laporan triwulanan Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Kampung Rawa periode April – Mei 2008.

4.4. Pengujian Persyaratan Analisis

Sebelum dilakukan uji korelasi dan regresi data penelitian harus memenuhi syarat yaitu berdistribusi normal. Untuk mengetahui kriteria tersebut maka dilakukan pengujian persyaratan analisis menggunakan Uji Chi-Kuadrat. Kriteria pengujian normalitas adalah jika $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ maka data penelitian berdistribusi normal. Uji prasyarat analisis dilakukan pada data berdasarkan perwakilan dari masing-masing sub populasi yaitu per RW dan juga dilakukan pada keseluruhan data pada populasi.

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Dibawah ini akan menjelaskan hasil uji hipotesis yang memiliki hubungan yang signifikan antara variabel Modal Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan. Untuk melihat hubungan antara kedua variabel teruji di level komunitas, sebelumnya perlu untuk dilihat hubungan-hubungan antara variabel teruji di level subkomunitas.

4.5.1. Hubungan Modal Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan RW 01

Tabel 4.30.

Persamaan Regresi Linier dan Korelasi Sederhana Antar Variabel RW 01

Variabel	RW 01			Signifikansi
	Persamaan Regresi	Korelasi		
		r_{hitung}	r_{tabel}	
Kelompok dan Jaringan sosial	$\hat{Y} = 98,782 + 0,400 X_1$	0,257	0,334	Tidak signifikan
Kepercayaan dan Solidaritas Sosial	$\hat{Y} = 103,323 + 0,107 X_2$	0,339		Signifikan
Tindakan Bersama dan Kerjasama	$\hat{Y} = 85,794 + 0,645 X_3$	0,377		Signifikan
Komunikasi dan Informasi Sosial	$\hat{Y} = 129,508 + 0,217 X_4$	0,082		Tidak signifikan
Kohesi dan Inklusi Sosial	$\hat{Y} = 102,809 + 0,629 X_5$	0,263		Tidak signifikan
Modal Sosial	$\hat{Y} = 57,066 + 0,333 X$	0,436		signifikan

Sumber : Data olahan empiris peneliti dengan menggunakan software statistic SPSS 11.

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara variabel Kepercayaan dan Solidaritas dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 103,323 + 0,107 X_2$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,339 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara variabel Kepercayaan dan Solidaritas dengan variabel Daya Dukung Lingkungan di RW 01 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,200 – 0,399.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,115. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 11,5% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kepercayaan dan Solidaritas atau pengaruh Kepercayaan dan Solidaritas terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 11,5%, dan sisanya sebesar 88,5% ditentukan oleh faktor lain.

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 85,794 + 0,645 X_3$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,377 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama dengan variabel Daya Dukung Lingkungan di RW 01 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,300 – 0,399.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,143. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi

pada variabel Daya Dukung lingkungan 14,3% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama atau pengaruh Tindakan Bersama dan Kerjasama terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 14,3%, dan sisanya sebesar 85,7% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel-variabel Modal Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan memiliki hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 57,066 + 0,333 X$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa meningkatnya variabel Modal Sosial yang dihasilkan dari variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial dan variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Modal Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,436 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara variabel Modal Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan di RW 01 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,400 – 0,599.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,190. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 19 % ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial dan variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama atau pengaruh Modal Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 19%, dan sisanya sebesar 81% ditentukan oleh faktor lain.

4.5.2. Hubungan Modal Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan RW 02

Tabel 4.31.

Persamaan Regresi Linier dan Korelasi Sederhana Antar Variabel RW 02

Variabel	RW 02			Signifikansi
	Persamaan Regresi	Korelasi		
		r _{hitung}	r _{tabel}	
Kelompok dan Jaringan sosial	$\hat{Y} = 74,915 + 0,615 X_1$	0,502	0,349	Signifikan
Kepercayaan dan Solidaritas Sosial	$\hat{Y} = 125,957 + 0,089 X_2$	0,023		Tidak Signifikan
Tindakan Bersama dan Kerjasama	$\hat{Y} = 120,821 + 0,052 X_3$	0,035		Tidak Signifikan
Komunikasi dan Informasi Sosial	$\hat{Y} = 88,885 + 0,168 X_4$	0,382		Signifikan
Kohesi dan Inklusi Sosial	$\hat{Y} = 119,447 + 0,138 X_5$	0,038		Tidak Signifikan
Modal Sosial	$\hat{Y} = 64,812 + 0,256 X$	0,379		Signifikan

Sumber : Data olahan empiris peneliti dengan menggunakan software statistic SPSS 11.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Kelompok dan Jaringan Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 74,915 + 0,615 X_1$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Kelompok dan Jaringan Sosial akan berakibat pula terhadap meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Kelompok dan Jaringan Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,502 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan cukup kuatnya hubungan antara Kelompok dan Jaringan Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan di RW 02 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,500 – 0,699.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,252. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 25,2% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kelompok dan Jaringan Sosial atau pengaruh Kelompok dan

Jaringan Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 25,2%, dan sisanya sebesar 74,8% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Informasi dan Komunikasi Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 88,885 + 0,168 X_4$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Informasi dan Komunikasi Sosial akan berakibat pula terhadap meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Informasi dan Komunikasi Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,382 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara variabel Informasi dan Komunikasi Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan di RW 02 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,300 – 0,499.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,146. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 14,6% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Informasi dan Komunikasi Sosial atau pengaruh Informasi dan Komunikasi Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 14,6%, dan sisanya sebesar 85,4% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel-variabel Modal Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 64,812 + 0,256 X$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan Modal Sosial yang dihasilkan dari variabel Kelompok dan Jaringan Sosial dan variabel Komunikasi dan Informasi Sosial akan berakibat pula terhadap meningkatnya Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya Modal Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,379 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara Modal Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan di RW 02 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,300 – 0,499.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,144. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 14,4% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kelompok dan Jaringan Sosial dan variabel Komunikasi dan Informasi Sosial atau pengaruh Modal Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 14,4%, dan sisanya sebesar 85,6% ditentukan oleh faktor lain.

4.5.3. Hubungan Modal Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan RW 06

Tabel 4.32.

Persamaan Regresi Linier dan Korelasi Sederhana Antar Variabel RW 06

Variabel	RW 06			Signifikansi
	Persamaan Regresi	Korelasi		
		r_{hitung}	r_{tabel}	
Kelompok dan Jaringan sosial	$\hat{Y} = 90,596 + 0,450 X_1$	0,231	0,339	Tidak Signifikan
Kepercayaan dan Solidaritas Sosial	$\hat{Y} = 94,372 + 0,393 X_2$	0,363		Signifikan
Tindakan Bersama dan Kerjasama	$\hat{Y} = 54,199 + 0,058 X_3$	0,653		Signifikan
Komunikasi dan Informasi Sosial	$\hat{Y} = 106,242 + 0,483 X_4$	0,185		Tidak Signifikan
Kohesi dan Inklusi Sosial	$\hat{Y} = 109,936 + 0,351 X_5$	0,139		Tidak Signifikan
Modal Sosial	$\hat{Y} = 43,141 + 0,343 X$	0,504		Signifikan

Sumber : Data olahan empiris peneliti dengan menggunakan software statistic SPSS 11.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 94,372 + 0,393 X_2$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,363 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya

hubungan antara variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan di RW 06 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,300 – 0,399.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,132. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 13,2% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial atau pengaruh Kepercayaan dan Solidaritas Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 13,2%, dan sisanya sebesar 86,8% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 54,199 + 0,058X_3$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,653 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kuatnya hubungan antara Tindakan Bersama dan Kerjasama dengan Daya Dukung Lingkungan di RW 06 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,600 – 0,799.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,426. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 42,6% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama atau pengaruh Tindakan Bersama dan Kerjasama terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 42,6%, dan sisanya sebesar 57,4% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel-variabel Modal Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 43,141 + 0,343 X$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Modal Sosial yang dihasilkan dari variabel Kepercayaan dan

Solidaritas Sosial dan variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Modal Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,504 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara Modal Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan di RW 06 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,400 – 0,599.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,254. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 25,4% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kepercayaan dan Solidaritas Sosial dan variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama atau pengaruh Modal Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 25,4%, dan sisanya sebesar 74,6% ditentukan oleh faktor lain.

4.5.4. Hubungan Modal Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan RW 08

Tabel 4.33.

Persamaan Regresi Linier dan Korelasi Sederhana Antar Variabel RW 08

Variabel	RW 08			Signifikansi
	Persamaan Regresi	Korelasi		
		r_{hitung}	r_{tabel}	
Kelompok dan Jaringan sosial	$\hat{Y} = 76,931 + 0,584 X_1$	0,579	0,320	Signifikan
Kepercayaan dan Solidaritas Sosial	$\hat{Y} = 118,080 + 0,150 X_2$	0,033		Tidak Signifikan
Tindakan Bersama dan Kerjasama	$\hat{Y} = 100,114 + 0,398 X_3$	0,255		Tidak Signifikan
Komunikasi dan Informasi Sosial	$\hat{Y} = 75,459 + 0,431 X_4$	0,587		Signifikan
Kohesi dan Inklusi Sosial	$\hat{Y} = 110,254 + 0,369 X_5$	0,137		Tidak Signifikan
Modal Sosial	$\hat{Y} = 53,987 + 0,323 X$	0,579		Signifikan

Sumber : Data olahan empiris peneliti dengan menggunakan software statistic SPSS 11.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Kelompok dan Jaringan Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa

terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 76,931 + 0,584 X_1$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Kelompok dan Jaringan Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Kelompok dan Jaringan Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,579 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan cukup kuatnya hubungan antara Kelompok dan Jaringan Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan di RW 08 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,400 – 0,599.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,335. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 33,5% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kelompok dan Jaringan Sosial atau pengaruh Kelompok dan Jaringan Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 33,5%, dan sisanya sebesar 66,5% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Informasi dan Komunikasi Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 75,459 + 0,431 X_4$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Informasi dan Komunikasi Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Informasi dan Komunikasi Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,587 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan cukup kuatnya hubungan antara Informasi dan Komunikasi Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan di RW 08 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,400 – 0,599.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,344. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 34,4% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Informasi dan Komunikasi Sosial atau pengaruh Informasi

dan Komunikasi Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 34,4%, dan sisanya sebesar 65,6% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel-variabel Modal Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 53,987 + 0,323 X$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Modal Sosial yang dihasilkan dari variabel Kelompok dan Jaringan Sosial dan variabel Komunikasi dan Informasi Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Modal Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,579 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara Modal Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan di RW 08 Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,400 – 0,599.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,335. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 33,5% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kelompok dan Jaringan Sosial dan variabel Komunikasi dan Informasi Sosial atau pengaruh Modal Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 33,5%, dan sisanya sebesar 66,5% ditentukan oleh faktor lain.

4.5.5. Hubungan Modal Sosial Komunitas dengan Daya Dukung Lingkungan Permukiman Kumuh.

Tabel 4.34.

Persamaan Regresi Linier dan Korelasi Sederhana Antar Variabel Total

Variabel	Komunitas			Signifikansi
	Persamaan Regresi	Korelasi		
		r _{hitung}	r _{tabel}	
Kelompok dan Jaringan sosial	$\hat{Y} = 106,297 + 0,232 X_1$	0,265	0,165	Signifikan
Kepercayaan dan Solidaritas Sosial	$\hat{Y} = 114,918 + 0,437 X_2$	0,146		Tidak Signifikan
Tindakan Bersama dan Kerjamsama	$\hat{Y} = 108,659 + 0,307 X_3$	0,337		Signifikan
Komunikasi dan Informasi Sosial	$\hat{Y} = 105,834 + 0,537 X_4$	0,246		Signifikan
Kohesi dan Inklusi Sosial	$\hat{Y} = 113,008 + 0,297 X_5$	0,173		Signifikan
Modal Sosial	$\hat{Y} = 90,488 + 0,150 X$	0,365		Signifikan

Sumber : Data olahan empiris peneliti dengan menggunakan software statistic SPSS 11.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Kelompok dan Jaringan Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 106,297 + 0,232 X_1$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Kelompok dan Jaringan Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Kelompok dan Jaringan Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,265 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara Kelompok dan Jaringan Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan di Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,200 – 0,399.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,070. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi

pada variabel Daya Dukung Lingkungan 7% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kelompok dan Jaringan Sosial atau pengaruh Kelompok dan Jaringan Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 7%, dan sisanya sebesar 93% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 108,659 + 0,307X_3$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,337 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara Tindakan Bersama dan Kerjasama dengan Daya Dukung Lingkungan di Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,200 – 0,399.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,114. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 11,4% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama atau pengaruh Tindakan Bersama dan Kerjasama terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 11,4%, dan sisanya sebesar 88,6% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Informasi dan Komunikasi Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 105,834 + 0,537 X_4$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Informasi dan Komunikasi Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Informasi dan Komunikasi Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,246 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara Informasi dan Komunikasi Sosial dengan Daya Dukung

Lingkungan di Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,200 – 0,399.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,061. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 6,1% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Informasi dan Komunikasi Sosial atau pengaruh Informasi dan Komunikasi Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 6,1%, dan sisanya sebesar 93,9% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Kohesi dan Inklusi Sosial dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 113,008 + 0,297X_5$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Kohesi dan Inklusi Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Kohesi dan Inklusi Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,173 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sangat kurang kuatnya hubungan antara Kohesi dan Inklusi Sosial dengan Daya Dukung Lingkungan di Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,000 – 0,199.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,030. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 3% ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kohesi dan Inklusi Sosial atau pengaruh Kohesi dan Inklusi Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 3%, dan sisanya sebesar 97% ditentukan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis hubungan antara variabel Modal Sosial Komunitas dengan variabel Daya Dukung Lingkungan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 90,488 + 0,150 X$. Persamaan regresi memberikan gambaran bahwa peningkatan variabel Modal Sosial yang dihasilkan dari variabel Kelompok dan Jaringan Sosial, variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama, variabel

Komunikasi dan Informasi Sosial dan variabel Kohesi dan Inklusi Sosial akan berakibat pada meningkatnya variabel Daya Dukung Lingkungan atau bertambah baiknya variabel Modal Sosial akan berakibat atau menandakan semakin kuatnya variabel Daya Dukung Lingkungan. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,365 dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan kurang kuatnya hubungan antara Modal Sosial Komunitas dengan Daya Dukung Lingkungan di Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat karena terletak antara 0,200 – 0,399.

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menghasilkan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,133. Angka ini memberikan interpretasi bahwa variasi pada variabel Daya Dukung Lingkungan 13,3 persen ditentukan oleh variasi yang terjadi pada variabel Kelompok dan Jaringan Sosial, variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama, variabel Komunikasi dan Informasi Sosial dan variabel Kohesi dan Inklusi Sosial atau pengaruh Modal Sosial terhadap Daya Dukung Lingkungan adalah sebesar 13,3%, dan sisanya sebesar 86,7% ditentukan oleh faktor lain.

BAB V

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN KUALITAS MODAL SOSIAL KOMUNITAS

Bagian ini akan menguraikan hasil analisis hubungan modal sosial komunitas dengan daya dukung lingkungan (dinamika sosial ekonomi dan lingkungan fisik di komunitas kumuh). Bagian sebelumnya mendeskripsikan tentang bagaimana kualitas masing-masing variabel teruji dalam dinamika kehidupan permukiman kumuh dan padat.

Modal sosial dapat berjalan dan bekerja dengan baik tanpa campur tangan dari pihak luar (Pemerintah), tapi tumbuh dari kesepakatan bersama dalam satu komunitas yang dilandaskan pada aturan-aturan, nilai tradisi, kepercayaan yang melekat dalam struktur sosial dan membentuk jaringan sosial yang mandiri.

5.1. Kualitas Modal Sosial Komunitas

Komunitas permukiman kumuh dan padat merupakan komunitas yang memiliki heterogenitas sosial dan tingkat kepadatan yang tinggi, lengkap dengan pola kelompok, kepemimpinan, wilayah, kepentingan yang terbentuk dengan proses dinamika kehidupannya. Dengan latar belakang tersebut, maka pengelolaan lingkungan sehat yang didasarkan pada pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan, memfasilitasi terciptanya iklim kondusif dan membuka akses sumber daya dan informasi serta mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya pendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman akan mempercepat tingkat partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan.

Implementasi dari konsep pemberdayaan masyarakat disini adalah penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat yaitu suatu proses peningkatan peluang kesempatan mandiri dan bermitra dengan pelaku pembangunan yang lain. Proses pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat merupakan suatu proses yang spesifik sesuai dengan karakter masyarakatnya, meliputi tahapan identifikasi karakter komunitas, identifikasi permasalahan,

perencanaan, pemrograman mandiri, serta pembukaan akses kepada sumber daya dan informasi.

Modal sosial komunitas memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi sosial melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan (Blakeley dan Suggate, 97; Suharto 2005a-b). Modal sosial komunitas didalamnya termasuk Kelompok dan Jaringan Sosial, Kepercayaan dan Solidaritas Sosial, Tindakan Bersama dan Kerjasama, Informasi dan Komunikasi Sosial, dan Kohesi dan Inklusi Sosial saling simultan bekerja dalam dinamika kehidupan komunitas.

Untuk memahami modal sosial dalam konteks dinamika komunitas di Kampung Rawa Barat dapat mengacu kepada pendapat Uphoff yang memperlihatkan bentuk modal sosial dalam dua kategori yaitu struktural dan kognitif. Dua kategori ini akan menjelaskan konsep modal sosial secara komprehensif. Dimana kategori struktural lebih menekankan pada Kelompok dan Jaringan Sosial, Tindakan Bersama dan Kerjasama, Informasi dan Komunikasi Sosial, dan Kohesi dan Inklusi Sosial. Sementara kategori kognitif lebih menekankan pada Kepercayaan dan Solidaritas Sosial antar warga. Kelima variabel tersebut secara utuh bekerja secara sinergis dan saling ketergantungan (*interdependensi*) dalam mengoperasikan kerja modal sosial komunitas. Modal sosial komunitas yang berjalan secara efektif mampu membentuk dan mengoperasionalkan modelnya dalam kehidupan komunitas.

Tabel 5.1.

Tipologi Modal Sosial dalam dinamika kehidupan komunitas

	Vertikal (kelurahan dengan warga)	Horizontal (antarwarga)
Struktural (Hubungan dan organisasi)	Forum Warga Dekel PKK Karang Taruna FAKTA	Kelompok Jawa, Betawi, Sunda, Padang. Majelis Ta'lim Paguyuban Sopir Angkot, kuli bangunan
Kognitif (nilai dan norma)	Kepercayaan Akuntabilitas Kemitraan/partnership Partisipasi Responsivitas	Solidaritas Toleransi Kepercayaan Kerjasama

Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi dari Coleman (1988, 1990), Putnam (1993, 2000), North (1990), Bain dan Hicks (1998), Uphoff (2000), Colleta dan Cullen (2001).

Bagan di atas bisa dijabarkan menjadi dua pemahaman besar tentang relevansi antara modal sosial dan daya dukung lingkungan. Secara horizontal, berbagai organisasi dan jaringan sosial merupakan arena bagi masyarakat sipil untuk membangun solidaritas, toleransi, kepercayaan dan kerjasama, atau yang sering disebut pluralisme. Apa yang mungkin disebut aliran pemikiran 'kepercayaan dan jaringan kerja sosial' mempunyai sejarah intelektual yang berbeda dan sangat panjang sebagai sebuah upaya untuk memecahkan salah satu persoalan klasik ilmu sosial: yaitu, bagaimana dan mengapa beberapa masyarakat, khususnya masyarakat skala besar modern, memelihara tingkat kesatuan sosial ketika konflik sosial dan ketidakpuasan politik yang serius mungkin mudah mengancam mereka.

Inti teori ini terdapat perhatian terhadap konsep kepercayaan dan peran organisasi sukarela. Kepercayaan memainkan peran sentral dalam masyarakat modern dan politiknya, karena sebagaimana Simmel (1950:326) mengatakan, 'kepercayaan adalah salah satu tenaga sintetik yang paling penting dalam masyarakat' (lihat juga Arrow 1972: 357; Coleman 1990: 306; Ostrom 1990; Putnam 1993; 1995; 2000; Fukuyama 1995; Braithwaite dan Levi 1998; Warren 1999).

Organisasi sukarela penting sekali karena keterlibatan warga negara dalam komunitas, khususnya asosiasi sukarela dan organisasi mediasi, mengajarkan

habits of heart (Bellah *et al.* 1985) kepercayaan, resiprositas, solidaritas, dan kerjasama. Organisasi sukarela juga dikatakan untuk menciptakan jaringan kerja yang kondusif bagi *social learning*, proses saling tolong-menolong, keterlibatan warga negara dan perhatian terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, kepadatan dan macam jaringan kerja yang luas sangat penting untuk menciptakan sikap demokrasi dan keterlibatan komunitas, pada satu pihak, dan struktur hubungan sosial yang stabil dan terpadu, pada pihak lain. Organisasi sosial yang melewati batas-batas primordial (agama, suku, daerah, dan lain-lain), misalnya, akan memainkan fungsi sebagai jembatan sosial (*social bridging*) untuk mengelola konflik.

Secara vertikal berbagai organisasi dan jaringan lokal menjadi tempat interaksi antara pemerintah (kelurahan) dan warga untuk membangun kepercayaan, akuntabilitas, kemitraan, responsivitas dan partisipasi. Secara teoretis warga yang didirikan dengan baik dengan keberagaman dan jumlah jaringan kerja sosial yang luas dan besar adalah perlu untuk melagengkan kebajikan warga negara yang diperlukan untuk pemerintahan yang baik.

Bagi banyak teoritis, organisasi sukarela adalah bentuk jaringan kerja sosial yang krusial dan kepercayaan antara warga negara dan pemimpin politik mereka. Kepercayaan bukan hanya merupakan konsep yang dipertentangkannya sendiri, tetapi ia mempunyai banyak sinonim dan istilah yang berhubungan erat tetapi tidak identik dengan kebersamaan, empati, resiproksitas, kesopanan, rasa hormat, solidaritas, toleransi, dan persaudaraan.

Dalam dinamika kehidupan komunitas kumuh dan padat perkotaan, kompleksitas struktur sosial mengakibatkan peran-peran yang harus dilakukan oleh setiap individu menjadi serba relatif, tergantung kepada status yang disandangnya. Status-peran yang dimiliki menjadikan setiap individu sebagai instrumen dalam keseluruhan proses sosial masyarakat; peran dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dialami secara individual.

Peran-peran dalam komunitas kumuh perkotaan seringkali dibedakan dengan tegas. Orang-orang saling mengadakan kontak hanya bila mereka memainkan peran-peran tertentu; hubungan sosial bersifat segmental dan tidak melibatkan seluruh kepribadian seperti halnya dalam komunitas tradisional.

Kontak sosial dalam komunitas seringkali berdasarkan kemanfaatan daripada berdasarkan status; orang-orang berinteraksi untuk tujuan-tujuan pribadi. Namun sebagai komunitas yang sedang berkembang, pada sebagian komunitas masih terdapat kontak sosial yang tidak sepenuhnya dalam rangka pemanfaatan pihak lain; walaupun orientasi material sudah mulai nampak dalam kontak sosial tersebut.

Menurut Durkheim (dalam Daldjuni: 1982: 43), pada masyarakat organik terjadi pengurangan suasana yang dikehendaki oleh mufakat kolektif serta pelembean reaksi kolektif terhadap pengetatan larangan. Nilai-nilai dan ketentuan bersama pada komunitas sekitar industri mulai meluntur dan mulai didominasi oleh sumber lain dalam melakukan kontrol sosial. Kalaupun nampak dalam kehidupan masyarakat, yang terlihat adalah 'kulit luarnya' saja, yaitu mode, selera, dan basa-basi. Simbol-simbol tatanan sosial pada komunitas kota ini adalah polisi, pengadilan, dan hukum positif –bukan adat istiadat atau tradisi. “Orang lebih mentaati peraturan bukan karena percaya akan kebaikan peraturan tersebut, tetapi karena manfaat menaatinya” (Schneider, 1993:442). Dalam kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan berbagai perbedaan diantara anggotanya diperlukan toleransi dan proses sosial yang akomodatif terhadap pihak lain guna menciptakan kehidupan yang rukun.

Karena peran-peran dipisah-pisahkan dan tidak nilai bersama, maka kesatu-paduan komunitas perkotaan menjadi lemah. Semangat kebersamaan, loyalitas kepada komunitas, dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama menjadi melemah. Individu merasa lebih loyal kepada keluarganya, kepada perusahaannya, atau kepada kelompoknya. Dalam mengembangkan loyalitasnya, individu mulai membatasi pada lingkungan yang terbatas, yang menurut pertimbangan pragmatisnya dapat mendukung dalam pemenuhan berbagai kebutuhannya. Dalam situasi demikian, loyalitas dan solidaritas lebih banyak diarahkan kepada lingkungan yang menurut perasaannya lebih dekat, sehingga kesatu-paduan ini lebih cenderung terdapat dalam kelompoknya, seperti diantara sesama pendatang walaupun berbeda latar belakang sosial budayanya.

Dari hasil uji korelasi sederhana ditemukan bahwa modal sosial komunitas memiliki hubungan yang kurang kuat terhadap daya dukung

lingkungan ($r = 0,365$) . Dalam hal ini ditunjukkan dengan kurang kuatnya variabel-variabel yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan, seperti Kelompok dan Jaringan sosial ($r = 0,265$), Kepercayaan dan Solidaritas Sosial ($r = 0,146$), Tindakan Bersama dan Kerjasama ($r = 0,337$), Informasi dan Komunikasi Sosial ($r = 0,246$), serta Kohesi dan Inklusi Sosial ($r = 0,173$).

Kondisi diatas dapat digambarkan dari pola tindakan bersama dan kerjasama yang cenderung didasarkan pada dalil-dalil ekonomi (unsur kemanfaatan), pola kehidupan kelompok dan jaringan sosial yang lebih bersifat heterogen tanpa ada satu ikatan dalam komunitas (*bounding social capital*) yang kuat. Artinya bahwa kehidupan kelompok-kelompok baik yang bersifat formal dan informal tidak membatasi ikatannya dalam satu komunitas saja tetapi memberikan kebebasan untuk melakukan interaksi dengan komunitas luar. Akibatnya ikatan dalam komunitas belum menjamin bentuk-bentuk kebersamaan dan keakraban yang kuat sehingga memungkinkan dapat menimbulkan kerentanan kehidupan komunitas. Hal ini tercermin dari interaksi sosial dalam komunitas tanpa didasari rasa kepercayaan dan sikap solidaritas sosial ($r = 0,146$) yang matang dalam membangun keberlangsungan kehidupan komunitas.

Berdasarkan pada hasil penelitian, modal sosial komunitas terbentuk karena faktor alamiah dan rekayasa¹. Modal sosial komunitas alamiah hidup dalam masyarakat yang sederhana, interdependen dan homogen. Modal sosial komunitas bekerja dalam sistem dan kegiatan keagamaan, sistem etnisitas dan primordial, dan sistem profesi pekerjaan yang dibangun secara tradisional dalam

1 Kelembagaan yang terbentuk secara alamiah, bermula dari pematangan suatu norma, sebagai bagian pokoknya. Suatu norma akan terbentuk secara bertahap mulai dari cara berperilaku belaka (*usage*), meningkat menjadi kebiasaan (*folkways*), menjadi tata kelakuan (*mores*), dan mantap ketika menjadi *custom* (Koentjaraningrat, 1997). Inilah yang disebut dengan proses pelembagaan (*institutionalization*), yaitu proses yang dialami norma baru untuk menjadi bagian dari kelembagaan. Jadi suatu norma dikatakan telah melembaga apabila telah diketahui, difahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai, sampai terjadi *internalized*, yaitu ketika norma-norma tersebut telah mendarah daging.

Faktor alamiah terbentuk karena norma-norma sosial dan keagamaan yang melekat pada interaksi sosial antar warga didalam komunitas ataupun melampaui batas-batas komunitas tersebut. Sedangkan faktor rekayasa lebih banyak di pengaruhi oleh kebijakan pemerintahan dalam membentuk, mengelola dan menjaga dinamika kehidupan antar warga yang berupa program ataupun kelembagaan yang sudah terinstitusi, mengatur dan menjaga kehidupan yang selaras dan harmonis.

unit sub-komunitas. Hal ini merupakan cerminan dari nilai-nilai tradisi, budaya yang melekat pada setiap individu bergerak dalam interaksi sosial dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama yang saling menguntungkan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan bersama dan dijalankan secara bersama-sama. Pola kehidupan ini memperlihatkan bentuk-bentuk modal sosial komunitas yang bersifat mekanik².

Modal sosial komunitas yang cenderung bersifat alamiah didasarkan pada interaksi sosial yang terbangun dalam komunitas masih mencerminkan posisi kedekatan secara fisik dan administrasi lingkungan. Hal tersebut tercermin dari nilai tradisi, budaya dan sosial yang melekat dalam interaksi sosial antar warga. Dalam level komunitas, kelompok sosial ini cenderung tidak memiliki struktur kerja konkrit, tetapi bekerja dan masuk dalam ranah subkomunitas-subkomunitas yang didasarkan pada hubungan tradisi budaya, profesi.

Ditinjau dari bentuk dan fungsi struktur, kelompok tersebut memiliki struktur yang didasarkan pada hubungan *patron-klien* sehingga keberadaannya hanya memiliki fungsi sebagai media sosialisasi dan pertukaran saluran informasi, peningkatan kapasitas, penguatan ikatan-ikatan sosial dalam menunjang eksistensi dalam kehidupan komunitas. Ikatan-ikatan sosial tumbuh atas kesadaran dan kebutuhan yang sama dalam tradisi budaya, agama dan kepercayaan yang bersifat tradisional. Kelompok tersebut meliputi kelompok Pengajian/Majelis Ta'lim, kelompok etnisitas seperti Jawa, Betawi, Kuningan, Cirebon, kelompok profesi kuli bangunan dan sopir angkutan.

Kelompok keagamaan lebih memberikan manfaat tentang nilai-nilai kereligiusan-Islamis, kehidupan sosial yang memegang prinsip-prinsip keagamaan. Hal ini tercermin dari banyaknya kelompok keagamaan dalam komunitas yang keberadaannya menyesuaikan dengan tempat ibadah. Secara mandiri dan sukarela, kelompok keagamaan ini hidup dalam dinamika kehidupan komunitas. Kehidupan kelompok keagamaan masih memegang prinsip *patron klien* antara santri/murid dengan kyai/ustad/guru. Kyai/Ustad sebagai tokoh

2 Kesadaran kolektif pada masyarakat mekanik paling kuat perkembangannya pada masyarakat sederhana, dimana semua anggota pada dasarnya memiliki kepercayaan bersama, pandangan, nilai, dan semuanya memiliki gaya hidup yang kira-kira sama. Pembagian kerja masih relatif rendah, tidak menghasilkan heterogenitas yang tinggi, karena belum pluralnya masyarakat.

panutan di setiap kelompok keagamaan memegang peranan yang dominan dalam mengarahkan berbagai program kegiatannya. Keanggotaan kelompok keagamaan ini bersifat heterogen yang tidak dibatasi oleh etnis, sosial ekonomi dan tradisi budaya akan tetapi secara sukarela dan mandiri hidup dalam satu kesatuan geografis permukiman. Dalam hal ini juga dapat terukur hubungan sosial kelompok-kelompok keagamaan yang berada di dalam komunitas dengan di luar komunitas sangat beragam dan ditentukan oleh mazhab/aliran yang dianut di masing-masing kelompok.

Kelompok alamiah tersebut masih memegang tradisi kedaerahan, nilai budaya dan norma-norma yang menjadi pembentuk karakter masyarakat daerah. Dalam segi kemanfaatannya, kehidupan kelompok secara mandiri dan sukarela mampu bertahan eksistensinya ditengah kehidupan perkotaan. Pertama eksistensi kedaerahan melalui beragam aktifitas seperti kelompok Jawa lebih menekankan pada tradisi keagamaan (tahlilan) yang berada RW 02. Kedua kelompok Padang lebih menekankan pada tradisi dagang dimana kelompok ini hidup dan beraktifitas hanya di pusat kegiatan ekonomi (Pasar Gembong). Ketiga kelompok Kuningan lebih menekankan pada profesi pekerjaan buruh bangunan dan pedagang. Pola ikatan sosial akan terlihat ketika menjelang musim lebaran, kelompok ini mengadakan syukuran di daerah asalnya/kampung dengan melibatkan anggota kelompoknya. Keempat kelompok Betawi lebih menekankan pada kehidupan keagamaan dan tradisinya. Karena hidup dalam dinamika kehidupan perkotaan, hubungan sosial yang terbangun setiap kelompok sosial tersebut memiliki ikatan dan solidaritas (*bounded solidarity*) yang kuat. Namun keberadaan ikatan sosial tersebut tidak menutup kemungkinan juga membangun hubungan sosial dengan kelompok lain (*bridging solidarity*) yang ditunjukkan dengan berbagai kegiatan dan tindakan bersama-sama dalam satu komunitas bersama.

Sedangkan modal sosial yang berjalan karena upaya rekayasa, hidup dan berkembang dalam sistem sosial masyarakat kompleks, independen, heterogen, dan terlembagakan dalam sistem pemerintahan dan pasar. Modal sosial komunitas lebih banyak bekerja dalam sistem pelayanan pemerintahan dalam menjangkau warganya, seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, Dewan Kelurahan,

FAKTA dan bekerja atas dasar kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Pola kehidupan ini memperlihatkan bentuk-bentuk modal sosial komunitas yang bersifat organik³.

Pada level komunitas, kelompok Dewan Kelurahan (Dekel), PKK, Karang Taruna, dan Fakta memiliki struktur, keanggotaan dan kegiatan secara pasti. Keempatnya dalam dinamika kehidupan komunitas masih memiliki ketergantungan atau hubungan hirarki dari institusi kelurahan, artinya sistem kerja dimasing-masing level kelompok tersebut sangat disesuaikan dengan hirarki struktur birokrasi kelurahan. Karenanya program dan kegiatan yang paling utama dilakukan dalam rangka untuk menunjang program pelayanan publik dan penyerapan aspirasi warga.

Dalam struktur kelompok PKK tingkat kelurahan selalu melakukan kegiatan rutin per bulan sekali untuk mengadakan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) keliling di tingkat subkomunitas. Penggerak PKK secara aktif melakukan interaksi dengan warga melalui program-program yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan warga. Rutinitas kegiatan Posyandu mencerminkan lalu lintas informasi tentang pelayanan kesehatan ibu-anak berjalan secara efektif dan pola jaringan sosial terbentuk sangat kuat dibandingkan dengan kelompok yang lain.

Sementara kelompok PKK juga menjalankan program Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik) yang di laksanakan setiap bulan sekali di masing-masing rumah warga secara bergiliran. Fungsi kelompok PKK dalam mengawasi warga khususnya kesehatan anak-ibu dan Jumantik memberikan gambaran tentang keaktifan hubungan sosial yang terbangun dalam komunitas. Hubungan sosial kelompok PKK berdasarkan pada hirarki keanggotaan, artinya bahwa semakin tinggi jabatan struktural dalam kelompok tersebut semakin tinggi pula hubungan sosial yang terbangun diantara anggotanya atau semakin tinggi jabatan strukturalnya maka semakin tinggi pula nilai kemanfaatan mengikuti kegiatan.

³ Modal sosial komunitas yang bergerak tidak secara alamiah, di jalankan karena adanya stimulus dari luar dalam rangka untuk membangkitkan kesadaran dalam mengelola modal sosial komunitas. Ketika ketiadaan stimulus dari luar, modal sosial komunitas bergerak atau dalam posisi stagnan, bahkan mati dapat menyebabkan kehidupan komunitas dalam kondisi yang rentan dan rawan.

Meskipun intensitas kegiatan bersama dilakukan setiap bulan sekali di level subkomunitas, namun karena ada nilai kebermanfaatan yang diperoleh warga terhadap kesehatan mengakibatkan nilai kepercayaan dan solidaritas antar warga terbentuk. Pola kebersamaan dalam satu komunitas untuk berbagi dan menjaga kesehatan lingkungan menjadi prioritas program kelompok PKK dalam menjaga keberlangsungan kehidupan warga dan lingkungannya.

Kelompok Dewan Kelurahan dalam struktur kelurahan merupakan *mitra partnership* dengan institusi kelurahan (semacam DPR) yang berfungsi untuk menyerap aspirasi warga yang kemudian di salurkan pada institusi kelurahan secara utuh. Konsep keanggotaan di dasarkan pada perwakilan dari tiap-tiap RW/RT yang ditunjuk oleh pengurus RW/RT, bertugas di tiap-tiap RW/RT untuk menyerap aspirasi warga tentang berbagai lingkungan. Secara operasional, keberadaanya cukup membantu dalam mengelola potensi-potensi pembangunan, namun dalam prakteknya kelompok ini tidak berjalan secara efektif (cenderung pasif) karena kordinasi/rapat rutin hanya terjadi setiap tiga bulan sekali. Kalaupun terjadi satu kebutuhan yang mendesak menyangkut komunitas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pertemuan insidental.

Kelompok Karang Taruna yang beranggotakan pemuda-pemudi di komunitas secara sukarela dan bergerak untuk pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan. Kelompok Karang Taruna memiliki disfungsi keorganisasian, karena bergerak ketika adanya program-program yang menyangkut kegiatan seremonial seperti HUT RI ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hari besar keagamaan yang dilakukan bersama Remaja Masjid. Jadi tidak bisa dipastikan jadwal kordinasi dan jadwal program rutin sehingga berpengaruh terhadap pembentukan karakter pemuda di lingkungan yang cenderung hedonis. Hubungan sosial yang terbentuk lebih menekankan untuk kepentingan individual yang jauh dari kepentingan lingkungan permukiman.

Kelompok FAKTA (Forum Anti Kerusakan Antar Warga) dalam prinsip kerjanya masih menggunakan prinsip hubungan *patron-klien*, karena proses terbentuknya didasarkan pada hubungan sosial warga yang resah terhadap tingginya kerusakan antar warga yang terjadi di lingkungan. Dalam praktek untuk menyelesaikan berbagai kerusakan lebih memprioritaskan hukum-hukum

nonformal yang didasarkan pada tradisi dan budaya warga permukiman sehingga memudahkan untuk menghentikan dan mengurai akar kerusuhan yang terjadi. Sistem keanggotaannya bersifat sukarela, namun menekankan pada tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Keberadaan tokoh masyarakat dan agama merupakan bagian penting dari strategi untuk mempermudah penyelesaian kerusuhan antar warga atas dasar asas kekeluargaan dan jalan formal menurut hirarki struktur FAKTA di fungsikan sebagai struktur sosial yang dapat membantu mengurai kerusuhan. Jalan kekeluargaan ditempuh sebagai tahapan-tahapan penyelesaian kerusuhan antar warga sebelum memakai mekanisme formal⁴.

Walapun kordinasi rutin hanya berjalan setiap tiga bulan sekali, namun pertemuan-pertemuan insidental juga sering dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lingkungan. Kelompok FAKTA bekerja di unit-unit subkomunitas setiap hari, karena fungsinya tidak hanya mengawasi dan mengontrol keamanan warga tetapi juga melakukan sosialisasi keamanan lingkungan yang harus dijaga secara bersama-sama. Maka nilai kebersamaan dalam satu komunitas yang heterogen menjadi tanggungjawab bersama warga sehingga tercipta lingkungan permukiman yang nyaman dan aman. Namun kenyamanan dan keamanan dalam satu komunitas yang heterogen dan padat tidak menjamin tidak terjadi kerusuhan antar warga, karena akar kerusuhan antar warga tidak hanya disebabkan dari dalam komunitas tetapi dapat juga diakibatkan dari luar komunitas yang terbawa dalam lingkungan komunitas. Kerusuhan antar warga seperti inilah yang kadang-kadang terjadi di lingkungan komunitas.

Dinamika kehidupan komunitas tercermin dari pola partisipasi warga dalam bentuk tindakan dan kerjasama yang dilakukan secara kolektif. Pada level komunitas, tindakan bersama adalah kerja bakti massal yang dilakukan setiap minggu sekali secara bergiliran di level subkomunitas. Kerja bakti massal dilakukan berdasarkan program rutin dari kelurahan sehingga berjalan tidaknya sangat tergantung dari kinerja aparat kelurahan. Namun, sejauh ini program kerja bakti massal sudah menjadi tradisi kebersamaan warga dalam aspek gotong-royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena bentuknya lebih

4 prosedur penyelesaian kerusuhan antar warga yang melibatkan aparat kepolisian ataupun institusi kelurahan dan memakai prosedur hukum positif yang berlaku.

menekankan pada kebersihan lingkungan subkomunitas secara massal, maka peranan institusi kelurahan dalam penyediaan mobil angkutan sampah dan pengawasan sangat membantu warga subkomunitas. Bentuk pelayanan semacam ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah mengangkut sampah sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan menghindari tumpukan-tumpukan sampah di lingkungan permukiman yang dapat mengganggu pemandangan dan kesehatan warga.

Ditinjau dari aspek ikatan sosial antar aparat kelurahan dan warga atau ikatan sosial aparat kelurahan terhadap lingkungan komunitas cenderung lemah (23%). Dalam hal ini disebabkan karena secara hukum administrasi Pemprov DKI Jakarta, struktur kepegawaian dalam wilayah administrasi kelurahan memiliki status sebagai PNS (pegawai negeri sipil). Logika hukum administrasi pemerintahan, pegawai kelurahan dapat diambilkan dari daerah lain ataupun daerah setempat sesuai dengan keputusan penempatan kepegawaian negeri.

Dalam prakteknya, kepegawaian kelurahan Kampung Rawa banyak didominasi pegawai negeri yang berdomisili di luar Kampung Rawa seperti Ciputat, Bekasi, Bogor. Kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap proses pelayanan dan pengawasan terhadap dinamika kehidupan komunitas. Ikatan sosial yang terbentuk antara aparat kelurahan dengan lingkungan komunitas sangat terbatas pada pola-pola hubungan formal sehingga dapat mengganggu ikatan emosional dan kebersamaan dalam satu komunitas. Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan PNS yang berdomisili jauh diluar komunitas akan mempengaruhi kinerja berupa bentuk pelayanan dan biaya operasional sangat tinggi tentunya akan membebani biaya PNS dalam sehari-harinya.

Namun, upaya-upaya birokrasi kelurahan untuk mendekatkan diri dalam satu ikatan dengan komunitas lingkungan terus dilakukan. Yakni dengan mendorong peranan RT/RW dalam berinteraksi dengan warga dalam memberikan pelayanan dan pengawasan. Untuk menunjang kegiatan tersebut, melalui Keputusan Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif per bulan kepada pengurus RT sebesar Rp. 700.000,- yang diperuntukkan sebagai biaya

operasional pengurus RT dalam menjalankan fungsi dan tugasnya⁵. Bentuk apresiasi kepada RT semacam ini merupakan bagian dari strategi untuk merangsang mobilitas ketua RT dalam memfungsikan peran dan tugasnya dalam memberikan pengawasan dan pelayanan terhadap warganya.

Dua bentuk modal sosial komunitas hasil rekayasa dan alamiah memiliki karakteristik dasar yang melekat pada tipologi dalam konteks ide, relasi dan perhatian yang tidak berorientasi ke dalam komunitas (*inward looking*) akan tetapi juga berorientasi ke luar komunitas (*outward looking*). Hal ini merupakan cerminan dinamika kehidupan permukiman kumuh perkotaan bergerak dalam perkembangan arus modernisasi yang melihat tradisi, budaya dan norma-norma sebagai satu nilai yang fleksibel, dapat dirasionalisasi secara obyektif.

Komunitas Kampung Rawa Barat merupakan *melting plot* masyarakat urban yang berada dalam kondisi kumuh dan padat, kohesifitas komunitas yang terbentuk karena kerekatan hubungan emosional kurang kuat. Kerekatan tersebut disebabkan oleh pola nilai yang melekat dalam setiap proses interaksi juga berpola secara tradisional dan modern. Akibatnya, komunitas tersebut terisolasi dan sulit keluar dari pola-pola kehidupan yang telah turun temurun menjadi kebiasaan. Dalam kondisi tertentu, kohesifitas antar warga dalam komunitas dapat bekerja sangat kuat atau saling melindungi (*bounding solidarity*) ketika terjadinya tekanan-tekanan dari luar komunitas (aparatus kepolisian dan pemerintahan) seperti yang berhubungan dengan tindak pidana kriminalitas narkoba dan kadang pula melemah seolah-olah tidak peduli.

Komunitas yang memiliki orientasi ke dalam komunitas, hubungan sosial dengan tingkat kohesifitas kuat belum tentu merefleksikan kemampuan komunitas untuk menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan modal sosial tumbuh dalam batas kelompok tertentu, terutama jika kelompok-kelompok didominasi oleh struktur hirarki feodal yang memiliki hubungan *patron-klien*. Kohesifitas sosial yang bersifat *bounding social capital* mampu memberi dampak bagi kemampuan peningkatan kesejahteraan bersama termasuk mengangkat mereka dari kemiskinan.

5 Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kampung Rawa menyoal upaya membangkitkan kinerja pengurus RT dalam menjangkau pelayanan terhadap warganya.

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa, terbentuknya pola jaringan yang bersifat formal dan informal. Pola jaringan sosial informal (*bottom up*) yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk satu kelompok informal pula yang menekankan tradisi, budaya dan nilai-nilai bersama. Kelompok informal dalam aspek tindakan bersamanya menekankan kepentingan-kepentingan kebersamaan dalam memiliki kesamaan tradisi, etnis dan budaya , kemudian juga menguatkan kebersamaan dalam aspek ekonomi, moralitas. Dalam dinamikanya kelompok informal menjadi wadah bersosialisasi warga dalam rangka memperoleh informasi dan sekaligus juga memperkuat kebersamaan dan memupuk kepercayaan dalam kehidupan satu komunitas.

Sedangkan pola jaringan sosial secara formal (*top down*) yang terbangun membentuk kelompok sosial formal yang menjadi kebutuhan bersama antara warga dan pemerintahan. orientasi tindakan dan pola kerjasamanya cenderung memiliki kepentingan komunitas yang lebih luas seperti kesehatan lingkungan dan warga, pengelolaan sumberdaya manusia dan ekonomi warga. Walaupun pola jaringan formal sangat berpengaruh dalam dinamika kehidupan permukiman, namun keberadaannya yang tergantung dari program-program pemerintahan yang dijalankan melalui kelompok sosial dengan melibatkan warga belum mampu menjawab peningkatan kesadaran warga dalam mengelola lingkungan secara mandiri dan sukarela. Dalam hal inilah mengapa modal sosial komunitas memiliki hubungan yang kurang kuat terhadap daya dukung lingkungan.

Kurang kuatnya modal sosial komunitas tercermin dari modal sosial subkomunitas di setiap unit Rukun Warga. Hasil analisis penelitian, modal sosial subkomunitas RW 08 memiliki tingkat koefisien korelasi ($r = 0,579$) yang cukup kuat dibandingkan dengan modal sosial subkomunitas RW 06 ($r = 0,504$), RW 01 ($r = 0,436$) dan RW 02 ($r = 0,379$). Gambaran ini menjelaskan bahwa dinamika kehidupan ekonomi sosial subkomunitas memiliki karakteristik yang hampir sama, namun kecenderungan perbedaan yang terletak pada koefisien korelasi lebih disebabkan karena pola-pola kehidupan ekonomi sosial yang berbeda.

Secara umum dapat di deskripsikan, letak geografis lingkungan sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap pola hunian dan kehidupan warganya.

menurut hukum konsentrik Burgess, secara geografis permukiman kumuh dan padat berada di dekat/pinggiran pusat-pusat kegiatan ekonomi kota. Dalam perspektif yang sederhana, Pasar Gembrong bukan satu-satunya pusat kegiatan ekonomi, namun warga juga membangun kegiatan-kegiatan ekonomi secara individu dan mandiri yang bersifat kecil-menengah (UKM)⁶ tersebar dan menyatu dengan hunian komunitas.

Komunitas di sekitar pasar, mengembangkan satu karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini terjadi karena pasar memiliki daya pengaruh yang besar terhadap komunitas untuk menimbulkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Menurut Louis Wirth (dalam Daldjuni, 1982:27): “kota ditentukan oleh ukurannya yang cukup besar, kepadatan penduduknya, dan heterogenitas masyarakatnya.” Gaya hidup khas kekotaan disebut dengan urbanisme; dan ini ditentukan oleh ciri-ciri spasial, sekularisasi, asosiasi sukarela, peranan sosial yang terpisah dan norma-norma yang kabur. Mengenai pemikiran Wirth ini, Daldjuni (1982:28) berpendapat bahwa:

Pokok-pokok yang dibicarakan oleh Wirth meliputi kedangkalan interaksi individu, anomie, serta perspektif penelaahan urbanisasi... Sebagai struktur sosial, urbanisasi menggantikan hubungan primer dengan sekunder. Akibatnya di kota ikatan kekerabatan lemah, gotong royong menipis, dan solidaritas goyah... Urbanisme melahirkan mentalitas kota dimana sikap, ide, dan keperibadian manusianya lain dengan yang terdapat di pedesaan”

Urbanisme pada komunitas perkotaan sebagai sebuah gejala yang rasional, karena dorongan dari modernisasi dan juga sebagai hasil dari proses adaptasi masyarakat terhadap tuntutan aktivitas kerja. Modernisasi membutuhkan tenaga kerja yang aktif, sifat tenaga kerja yang demikian tidak dapat diperoleh dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang ketat, karena ikatan sosial

6 UKM-UKM yang memiliki jenis modal kecil menyebar ke seluruh permukiman dan menyatu dengan tempat hunian, seperti bengkel, wartel, isi air galon, warung makan, tempat sablon, industri tempe-tahu. Hal ini berbeda dengan di Pasar Gembrong, merupakan pusat pertemuan warga dalam melakukan transaksi jual beli barang dagangan dalam skala yang lebih besar dan tempat-tempat kegiatan ekonominya tidak menyatu dengan tempat hunian.

yang ketat akan mengganggu mobilitas warga masyarakatnya. Ikatan sosial yang longgar demikian akan mempengaruhi bentuk solidaritas sosial masyarakatnya.

5.1.1. Kualitas Modal Sosial Sub-Komunitas RW 01

Kurang kuatnya modal sosial sub-komunitas RW 01 ($r = 0,436$) dalam memprediksi daya dukung lingkungan berpengaruh terhadap bentuk-bentuk modal sosial sub-komunitas. Ditinjau dari unsur modal sosial komunitas, variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama bekerja secara lemah ($r = 0,377$) yang hanya didasarkan pada tingkat Kepercayaan dan Solidaritas Sosial yang lemah ($r = 0,339$).

Secara umum, warga permukiman berasal dari daerah Jawa, Sunda (Kuningan dan Serang) dan Sumatra dengan mata pencaharian sebagai pedagang dan wiraswasta. Kondisi sosial ekonomi semacam ini telah membentuk pola kerjasama untuk melakukan tindakan bersama didasarkan pada kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Pola hutang piutang, tolong-menolong, gotong royong antar warga berjalan ditengah dinamika kehidupan komunitas heterogen masih dalam batas tradisi budaya komunitas.

Gambaran ini dapat ditunjukkan dengan saluran santunan sosial terhadap anak yatim per tahun sebesar Rp. 200 ribu/orang, bantuan transportasi bagi anak yatim sebesar Rp. 20 ribu/bulan untuk Sekolah Dasar, Rp. 40 ribu/bulan untuk SMP. Kemudian santunan terhadap warga yang meninggal sebesar Rp.300 ribu. Bentuk santunan ini dikelola dan dijalankan secara bersama dalam satu kelompok komunitas sosial warga dan RT/RW. Bentuk-bentuk santunan diatas mencerminkan tingkat solidaritas dan kepedulian cukup tinggi terhadap warga kurang mampu atau yang mengalami musibah.

Sementara, iuran kebersihan dan keamanan warga dilakukan per bulan sekali sebesar Rp.3000/orang yang dipergunakan untuk memberikan insentif kepada petugas kebersihan dan keamanan warga. Petugas kebersihan melakukan tugasnya setiap hari dengan mengambil dan membawa sampah-sampah warga ke tempat pembuangan sementara, kemudian tiap dua minggu akan diangkut ke TPA dengan menggunakan fasilitas mobil sampah kelurahan. Oleh karenanya keberadaan petugas kebersihan komunitas sangat penting dalam membantu

meringankan petugas kebersihan kelurahan untuk mengambil sampah warga. Sedangkan petugas keamanan juga melakukan kegiatannya tiap malam. Pemberian insentif ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing petugas dalam menjalankan tugas dan perannya di lingkungan komunitas.

Tindakan bersama yang terlembagakan secara formal meliputi Majelis Taklim Syarif Hidayatullah, Nurul Aini, dan Baitul Amin dilakukan setiap minggu sekali. Masing-masing kelompok pengajian memiliki keanggotaan dari remaja, ibu dan bapak. Bentuk ikatan sosial dalam ketiga kelompok tersebut sangat kuat yang terletak dalam struktur dan hubungan *patron-klien* komunitas pengajian (kyai/ustad-santri). Masing-masing kelompok memiliki hubungan sosial yang tidak hanya berorientasi ke dalam komunitas tetapi juga ke luar komunitas. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan berbagai kegiatan bersama yang kadang-kadang dilakukan diluar komunitas.

Jenis kegiatan bersama lainnya yang memiliki kesamaan seperti Posyandu dan Jumantik dilakukan “rutin” setiap bulan sekali per tanggal 27. Kegiatan posyandu dan Jumantik memberikan manfaat banyak tentang pola kebersamaan komunitas yang ditunjukkan dengan kontrol dan pengawasan terhadap kesehatan warga dan kesehatan lingkungan. Program Posyandu dan Jumantik yang digerakkan kelompok PKK menjadi wadah interaksi sosial kelompok ibu-ibu secara intensif menjadi bukti bahwa partisipasi kelompok ibu dengan kelompok PKK dalam proses pengelolaan kesehatan cukup tinggi di bandingkan dengan kelompok lainnya.

Untuk meningkatkan ikatan kebersamaan dan solidaritas kelompok PKK yakni dengan mengadakan kegiatan Arisan bersama yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan Posyandu keliling. Besaran arisan bersama kelompok PKK sebesar Rp. 100.000,- dengan mekanisme kerja secara adil. Arisan bersama kelompok PKK juga dapat membantu perekonomian keluarga, karena penarikan undian dilakukan setiap bulan sekali maka setiap anggota akan mendapat “jatah” secara bergiliran. Pola semacam inilah yang dilakukan kelompok ibu-ibu dalam menumbuhkan kebersamaan dan kesatuan komunitas dalam menciptakan kesehatan lingkungan.

Kemudian kegiatan Karang taruna didasarkan pada kegiatan-kegiatan menjelang perayaan hari besar nasional (HUT RI) dan keagamaan yang dilakukan bersama dengan Remaja Masjid setempat. Ketiadaan kordinasi dan kegiatan merupakan bentuk dari kepasifan kegiatan karang taruna yang menjadi tolok ukur rendahnya pengelolaan potensi pemuda dan lingkungan dalam batas-batas ketidakberdayaan.

Oleh karenanya pola tindakan bersama dan kerjasama yang digerakkan kelompok sosial lebih didominasi karena adanya faktor struktur birokrasi kelurahan (*top down*) dan sudah bekerja menjadi tradisi akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya pola kebersamaan, kepercayaan dan solidaritas yang bekerja secara rapuh ($r = 0,339$). Proses ketergantungan yang tinggi terhadap program pemerintahan akan berpengaruh terhadap kadar kesadaran warganya dalam proses pembangunan dan kepedulian terhadap lingkungan komunitas. Ketika kelompok sosial tersebut tidak berfungsi, maka bangunan kepercayaan dan solidaritas akan pudar sehingga lingkungan komunitas akan mengalami kerentanan sosial.

5.1.2. Kualitas Modal Sosial Sub-Komunitas RW 02

Modal sosial subkomunitas RW 02 dapat digambarkan dari cara beroperasi dan bekerjanya bentuk-bentuk modal sosial subkomunitas dalam dinamika kehidupan warganya. Ditinjau dari unsur modal sosial komunitas, variabel Kelompok dan Jaringan Sosial berjalan kurang kuat ($r = 0,502$) namun informasi dan komunikasi sosial terbentuk kurang kuat ($r = 0,382$) sehingga berpengaruh terhadap kurang kuatnya modal sosial sub-komunitas di RW 02 ($r = 0,379$). Cerminan kurang kuatnya modal sosial sub-komunitas dapat ditunjukkan jaringan sosial yang terbentuk dalam komunitas-komunitas baik yang terstruktur maupun tidak. Karena posisi geografis terletak dipusat kegiatan ekonomi warga (Pasar Gembrong), membentuk pola hunian berdempetan yang terletak dipinggiran mengelilingi Pasar Gembrong.

Komunitas permukiman yang memiliki karakteristik terbuka, lalu lintas informasi dan komunikasi sosial berjalan sangat cepat dan cepat pula hilang dalam kesadaran warga. Informasi dan komunikasi sosial semacam ini memiliki

kecenderungan tidak memiliki dampak terhadap satu bentuk bangunan ikatan sosial yang kuat akan tetapi hanya bersifat sementara. Ketika ada kepentingan yang menguntungkan untuk komunitas, informasi dan komunikasi tersebut sangat bermanfaat bagi warga.

Kepadatan hunian dan dinamika kegiatan ekonomi sosial di Pasar Gembrong cukup tinggi berpengaruh terhadap intensitas hubungan sosial antar warga. Hubungan sosial antar warga “sering” dilakukan dalam satu komunitas RT/RW (40,6%), “kadang-kadang” juga melakukan hubungan sosial dengan warga luar komunitas (59,4%) dan institusi kelurahan/organisasi sosial (37,5%). Hal ini memperlihatkan pada pola jaringan sosial yang terbangun di komunitas telah melintas batas wilayah geografis permukiman dan sangat berhubungan dengan pola pekerjaan warga yang dominan bukan hanya di kerjakan di dalam komunitas tetapi dilakukan di luar komunitas (Pasar Senen dan sekitarnya).

Gambaran diatas berpengaruh terhadap pola informasi dan komunikasi sosial warga yang terbentuk dari komunikasi sosial antar warga selalu bermuara di dalam lingkungan komunitas. Distribusi informasi dapat diperlihatkan dengan aktifnya warga dalam melakukan hubungan sosial dengan warga lainnya dalam kesatuan komunitas bersama.

Heterogenitas jejaring sosial baik yang dilakukan antar warga dalam komunitas ataupun diluar komunitas dalam membentuk komunitas bersama belum menjamin keberlangsungan kehidupan komunitas secara efektif. Komunitas di Pasar Gembrong terbentuk didasarkan pada kepentingan ekonomi-dagang yaitu hubungan saling menguntungkan, sementara komunitas hunian yang berada dipinggiran atau berdempetan dengan pasar gembrong lebih didasarkan pada hubungan sosial yang memegang tradisi dan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama warga. Pola solidaritas dan kebersamaan yang kuat tidak terletak di pusat pasar Gembrong akan tetapi terletak di pinggiran pasar Gembrong.

Dalam struktur sosial kelompok orang Jawa⁷, terbentuknya hubungan sosial secara sukarela dikarenakan ada kesamaan etnis dan keyakinan yang

7 Kelompok etnis Jawa yang secara sukarela dan mandiri berorientasi untuk menunjukkan eksistensinya dalam komunitas kehidupan perkotaan dengan memegang tradisi budaya. Berkumpul dan membentuk komunitas pengajian bersama setiap malam jumat yang dilakukan

memiliki tradisi dan budaya yang hampir sama. Hubungan sosiabilitas kelompok Jawa merupakan cerminan dari kuatnya ikatan tradisi dan budaya (*bounding social capital*), namun juga tidak membatasi ruang gerak komunitas untuk berinteraksi secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi yang dibangun dalam komunitas Jawa adalah sebatas pengajian rutin dan arisan bersama, sementara aktifitas lainnya larut dalam dinamika kehidupan komunitas. Kelompok Jawa menjadi sebuah media sosialisasi bagi anggotanya untuk berinteraksi dan berbagi dalam membangun kebersamaan dan solidaritas dalam satu komunitas. Dalam perkembangannya, kelompok Jawa bergerak semakin melemah dan hanya melibatkan kelompok bapak-bapak, sementara kelompok remajanya bergerak melampaui ruang batas-batas tradisi dan budaya yang mengikat kehidupan komunitas.

Berbeda dengan kelompok Betawi, terbentuknya tidak terbatas pada kesamaan etnis betawi tetapi telah melampaui ruang-ruang tradisi dan budaya betawi sehingga komunitas mampu memberikan saluran-saluran komunikasi antar warga dalam komunitas (*bridging social capital*)⁸. Terbentuk hubungan *patron-klien* yang cukup kuat antara pimpinan kelompok dengan anggota ataupun warga dalam komunitas. Kelompok Betawi mampu mengikat mereka-mereka yang mempunyai kesamaan minat, nilai dan latar belakang (usia, status, pekerjaan, pendidikan dan lain lain), sekaligus menjembatani perbedaan antar minat, antar nilai dan antar latar belakang tersebut. Lebih jauh lagi modal sosial yang dimilikinya tidak hanya tercipta dengan dasar-dasar kesamaan, tapi juga dengan perbedaan.

Disamping kelompok sosial etnis diatas, ikatan sosial pedagang kelompok Padang dan Sunda juga mengalami dinamika dalam subkomunitas. Kelompok ini lebih memiliki orientasi pada prinsip ekonomi dagang yang dilakukan di Pasar Gembrong dan selebihnya mengikuti dinamika kehidupan lingkungan komunitas. Walaupun dalam prinsip ekonomi akan muncul persaingan bisnis namun

secara bergiliran dari rumah ke rumah didalam komunitas Jawa. Memiliki struktur sederhana yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

8 Komunitas Betawi yang terdapat di RW 02 adalah FBR, Forkabi, PMB. Tidak membatasi ruang gerak komunitas untuk merekrut anggota diluar etnis betawi, namun etnis Sunda ataupun Jawa juga diperbolehkan menjadi anggota dengan syarat tunduk pada mekanisme kerja yang disepakati komunitas Betawi secara umum.

keberadaannya mampu menjaga tradisi dan nilai kebersamaan antar pedagang dalam komunitas Pasar Gembrong.

Kemudian kelompok Arisan warga sukarela dan mandiri di RW 02 yang dilakukan setiap tanggal 10 per bulannya dengan tingkat partisipasi warga yang tinggi. Setiap kepala keluarga terlibat aktif dalam kelompok tersebut, memiliki struktur kerja yang cukup memadai sehingga relasi-relasi sosial yang terbentuk mampu membangkitkan hubungan sosiabilitas antar warga. Kelompok arisan warga juga atas sepengetahuan birokrasi kelurahan secara resmi, karena setiap diadakan arisan warga selalu mendatangkan birokrasi kelurahan. Pola ini merupakan upaya warga untuk mendekati diri aparat birokrasi dalam kegiatan informal warga sehingga terbentuk satu kesatuan ikatan yang kuat dalam komunitas. Kelompok semacam ini merupakan media untuk membangun komunikasi, kebersamaan, solidaritas antar warga ataupun dengan institusi kelurahan sehingga mampu membentuk ikatan emosional yang kuat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan lingkungan komunitas.

Sementara kelompok formal yang aktif dalam kegiatan di subkomunitas adalah kelompok PKK. Karena fungsi dan sistem kerjanya bergerak dalam wilayah RW di seluruh Kelurahan Kampung Rawa maka pola jaringan dan hubungan sosial warga dengan pengurus kelompok PKK terbangun melalui kegiatan-kegiatan bersama. Kegiatan bersama kelompok PKK merupakan wadah bertatap muka, bersosialisasi dan mendapatkan informasi tentang kesehatan lingkungan warga sehingga fungsi kontrol dan pengawasan birokrasi kelurahan terhadap warganya bisa terpantau dengan mudah.

5.1.3. Kualitas Modal Sosial Sub-Komunitas RW 06

Modal sosial subkomunitas RW 06 dapat digambarkan dari cara beroperasi dan bekerjanya bentuk-bentuk modal sosial subkomunitas dalam dinamika kehidupan warganya. Ditinjau dari unsur modal sosial komunitas, variabel Tindakan Bersama dan Kerjasama berjalan cukup kuat ($r = 0,653$) dengan tingkat Kepercayaan dan Solidaritas Sosial yang relatif kecil ($r = 0,363$) berpengaruh terhadap modal sosial sub-komunitas yang beroperasi cukup kuat ($r = 504$).

Bangunan kerjasama antar warga dihasilkan dari hubungan saling menguntungkan dengan ikatan saling percaya untuk melakukan tindakan bersama. Perlu disadari, tindakan bersama dan pola kerjasama yang dilakukan warga dalam komunitas merupakan cerminan dari jaringan sosial yang membentuk komunitas bersama. Jaringan sosial yang dilakukan baik antar warga dalam komunitas ataupun diluar komunitas dan institusi kelurahan akan membentuk pola-pola kerjasama yang bersifat formal ataupun informal.

Pola tindakan dan kerjasama yang dilakukan antar warga dalam komunitas lebih memosisikan sebagai satu *entitas* bersama yang saling membutuhkan dalam aspek sosial ekonomi, seperti hutang piutang, gotong royong membantu warga yang mengalami musibah ataupun yang sedang menjalankan hajatan yang bersifat insidental. Sebagai satu *entitas* sosial, warga komunitas secara informal membentuk pola kerjasama dan tindakan bersama dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupannya.

Sedangkan pola tindakan dan kerjasama yang bersifat formal merupakan cerminan dari jaringan sosial yang terbangun dari hubungan antar warga dengan institusi kelurahan. Tindakan bersama disesuaikan dengan jenis jaringan sosial yang terbangun seperti Majelis Ta'lim, yayasan sosial dan jaringan sosial yang terbangun karena keterbatasan jangkauan institusi kelurahan ditingkat warga seperti Karang Taruna, PKK, Fakta, Dekel.

Secara umum, tindakan bersama jaringan sosial yang terbangun karena tradisi dan kebutuhan antar warga bersifat sosial “kadang-kadang” dilakukan di lingkungan komunitas (38,2%). Kemudian kegiatan keagamaan sering dilakukan di tiap-tiap kelompok pengajian dalam sebulan sekali (55,1%). Melakukan pengajian rutin atau yasinan setiap malam jumat, setiap malam selasa melakukan pengajian tauhid dan fiqih di Masjid Nurul Muslimin yang diperuntukkan untuk remaja dan bapak-bapak, sedangkan bagi kelompok ibu menjalankannya setiap hari minggu. Disamping itu, yayasan sosial Insan Makmur memberikan santunan pendidikan anak-anak yatim yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Pola-pola hubungan sosial yang dilakukan dalam kelompok diatas terbentuk karena hubungan *patron-klien* yang cukup kuat antara pimpinan kelompok dengan anggotanya.

Sedangkan tindakan bersama merupakan cerminan dari jaringan sosial yang terbangun atas hubungan sosial warga dengan institusi kelurahan dilakukan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan sosial komunitas. Kerja bakti massal dalam lingkungan komunitas dilakukan setiap delapan minggu sekali dengan tingkat partisipasi warga tinggi, walaupun terkesan sangat organik dalam melakukan kerja bakti massal namun hal ini mencerminkan kepedulian dan rasa solidaritas warga yang tinggi terhadap keberlangsungan kehidupan komunitas. Selain itu, tindakan bersama lainnya adalah pelaksanaan posyandu yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali didominasi oleh kelompok ibu-anak dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

Kerjasama warga dalam melakukan penjagaan, pengawasan, dan dalam rangka mengatasi tindak kejahatan kerusuhan dan kriminalitas dalam komunitas bersama kelompok FAKTA. Berdasarkan data Ketua RW 06, 60 % anggota atau sekitar 125 orang anggota Fakta aktif dalam menjalankan tugasnya seperti pertemuan rutin setiap bulan sekali. Dibandingkan dengan sub-komunitas lainnya, RW 06 memiliki tingkat partisipasi dan keaktifan yang cukup tinggi (82,4%), karena dinamika kehidupan berjalan cukup tinggi dan rentan terhadap tekanan sosial sehingga memaksa warga dalam komunitas untuk menjalankan dan memfungsikan struktur sosial yang terbentuk baik secara alami maupun rekayasa.

Untuk membantu dalam mobilitas petugas kebersihan dan keamanan lingkungan, warga memungut iuran kebersihan dan keamanan warga dilakukan per bulan sekali sebesar Rp.3000/orang yang dipergunakan untuk memberikan insentif kepada petugas kebersihan dan keamanan warga. Petugas kebersihan dilakukan setiap hari dalam memungut dan membawa sampah-sampah warga ke tempat pembuangan sementara, kemudian tiap dua minggu akan diangkut ke TPA dengan menggunakan fasilitas mobil sampah kelurahan. Sedangkan petugas keamanan juga melakukan kegiatannya tiap malam. Pemberian insentif ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing petugas dalam menjalankan tugas dan perannya di lingkungan komunitas.

Untuk mengurai dan mencairkan hubungan antar warga, pertemuan rutin warga “kadang-kadang dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat ikatan

kebersamaan dalam satu komunitas (73,5%). Musyawarah warga dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan keseluruhan warga komunitas. Pola kebersamaan yang dibangun melalui musyawarah warga belum tentu menjamin rasa kepercayaan dan solidaritas antar warga ($r = 0,363$) yang kuat, namun bekerja secara rapuh dalam batas-batas ikatan sosial yang menjauhkan nilai tradisi dan budaya bersama sebagai komunitas bersama.

5.1.4. Kualitas Modal Sosial Subkomunitas RW 08

Modal sosial subkomunitas RW 08 dapat digambarkan dari cara beroperasi dan bekerjanya bentuk-bentuk modal sosial subkomunitas dalam dinamika kehidupan warganya. Ditinjau dari unsur modal sosial komunitas, variabel Informasi dan Komunikasi Sosial yang terbangun antar warga berjalan cukup dinamis ($r = 0,587$). Intensitas terbentuknya jalur-jalur informasi dan komunikasi antar warga sangat dipengaruhi dari tingkat kepadatan hunian, banyaknya ruang-ruang spasial, mobilitas sosial ekonomi banyak dilakukan di pemukiman, ketiadaan perbedaan status sosial ekonomi dalam membangun relasi sosial, dan status pendidikan warga yang memadai sehingga bangunan relasi sosial antar warga dan terhadap institusi kelurahan telah terpola dalam membentuk dinamika kehidupan kelompok dan jaringan sosialnya.

Kadang-kadang sumber informasi di dapatkan dari warga dalam satu wilayah RT/RW (71,1%), warga diluar komunitas (31,6%), dan dari institusi kelurahan/org.sosial (55,3%). Karena kondisi ekonomi sosial yang sangat padat, maka komunikasi sosial “sangat sering” dilakukan dalam satu komunitas RT/RW (42,1%), “kadang-kadang” dengan komunitas diluar permukiman (55,3%) dan kadang-kadang pula dengan institusi kelurahan/org.sosial (52,6%). Tingginya lalulintas informasi dan komunikasi sosial warga sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk jaringan dan kelompok sosial yang terbentuk di lingkungan komunitas.

Sejauh ini, pola dinamika kehidupan komunitas dalam membangun hubungan sosiabilitas antar warga dan institusi kelurahan tercermin dari dinamika kehidupan kelompok dan jaringan sosial yang berada dalam komunitas ($r = 0,579$). Bentuk kelompok-kelompok dalam dinamika kehidupan komunitas

mencerminkan pola jejaring sosial yang terbangun antar warga maupun institusi kelurahan yaitu yang bersifat formal dan informal⁹. Dinamika kehidupan kelompok di komunitas RW 08 dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi warga dan anggotanya dalam setiap kegiatannya.

Kondisi ekonomi sosial di RW 08 berpengaruh terhadap pola hubungan sosial yang terbangun antar warga “sering” bekerja dalam satu lingkungan komunitas RT/RW (65,8%). Kadang-kadang hubungan sosial ditunjukkan dengan warga luar komunitas (60,5%) dan sering pula warga melakukan hubungan sosial dengan institusi kelurahan/organisasi sosial (57,9%). Heterogenitas hubungan sosial yang tinggi memperlihatkan pada dinamisnya kehidupan warga dalam lingkungan komunitas.

Kelompok majelis ta’lim, ditinjau dari jenisnya memiliki tiga kelompok yaitu remaja, ibu, dan bapak dengan maksud untuk membedakan jenis dan kualitas pelajaran agama yang diberikannya. Masing-masing memiliki kegiatan rutin setiap minggu sekali berupa pengajian, tahlilan, arisan dan pelajaran tafsir agama dengan tingkat partisipasi tinggi. Ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah (2 masjid dan 4 mushola) dan tradisi budaya kereligiusan yang dibawa warga merupakan cerminan dari tradisi budaya warga Betawi, Kuningan dan Cirebon berdomisili di RW 08, kecuali kegiatan santunan anak yatim hanya diberikan pada saat menjelang hari raya. Kegiatan majelis ta’lim kemudian membentuk pola kehidupan komunitas yang didasari atas nilai dan tradisi budaya agama sampai sekarang, walaupun terus berpacu dengan kehidupan modern perkotaan yang telah mengikis habis nilai dan tradisi tersebut.

Dalam kelompok majelis taklim, terbentuk hubungan *patron-klien* yang cukup kuat (kyai/ustad/guru-santri) yang menyesuaikan dengan tempat ibadah. Selain itu, kelompok majelis taklim di komunitas RW 08 memiliki jaringan sosial antar majelis taklim yang berada di luar komunitas dan sering melakukan kegiatan bersama dalam satu titik wilayah dengan melibatkan majelis taklim di seluruh DKI Jakarta.

9 Kelompok formal menekankan pada struktur, keanggotaan dan jenis kegiatan yang jelas dan kelompok informal tidak membatasi pada struktur dan keanggotaan, namun menekankan pada jenis kegiatan dan keterlibatan pada kegiatan bersama dalam komunitas.

Kemudian komunitas yang didasari atas kesamaan etnisitas dan keyakinan seperti kelompok Betawi (FBR, Forkabi, PMB) yang berjalan melintas ruang dan batas kesamaan etnisitas. Di lingkungan komunitas, kelompok ini walaupun tidak memiliki struktur memadai namun mampu bekerja dan hidup dalam dinamika kehidupan komunitas yang dilakukan orang per orang. Hal ini ditunjukkan dengan dinamika kehidupan kelompok betawi yang memiliki intensitas dan rutinitas dalam membangun kegiatan bersama dilakukan diluar komunitas. Hubungan sosial terbangun lebih menekankan pada hubungan *patron-klien* dalam membina ataupun menjaga keberlangsungan kehidupan kelompok tersebut dalam komunitas.

Kelompok lain yang terbentuk karena kesamaan profesi yang tidak terlembagakan tetapi memiliki aktifitas bersama seperti kuli bangunan dan sopir angkutan. Kelompok kuli bangunan rata-rata didominasi pendatang dari Kuningan dan Cirebon yang hidup berbaur dengan warga dalam komunitas tapi dalam setiap aktifitasnya mereka selalu berkelompok. Karena tidak memiliki struktur yang kuat namun hanya didasarkan pada hubungan *patron-klien* yaitu adanya proses ketergantungan terhadap seseorang yang memiliki pengaruh dan pengalaman yang lama dalam menjalankan profesinya.

Begitupun dengan kelompok sopir angkutan juga didasarkan pada aktifitas di pangkalan-pangkalan angkutan. dimana di komunitas RW 08 memiliki 2 titik yang dijadikan tempat mangkal para angkutan. Karena tidak terstruktur secara rapi, namun komunitas ini bekerja atas tradisi dan kesepakatan bersama secara turun temurun yang dilihat sebagai *taken for granted* seperti pajak pangkalan dan jalan dengan imbalan ketika angkutan berurusan dengan pihak berwajib (polisi) karena melanggar tertib lalulintas maka secara otomatis pihak *patron* angkutan akan segera menyelesaikannya.

Sementara, kelompok FAKTA bekerja dalam menjaga, memediasi, menyelesaikan dan mengatasi tindak kerusuhan dan kriminalitas di lingkungan secara intensif melibatkan partisipasi warga. Dalam unit kerja RW, Fakta memiliki struktur yang sederhana (kordinator) yang bertugas untuk mengkoordinir setiap individu anggota untuk menjalankan program bersama. Menurut ketua RW 08, partisipasi warga dalam Fakta berjumlah 130 orang aktif.

Dinamika kehidupan Fakta terlihat dari intensitasnya mengatasi dan menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas yang aman dan nyaman setiap minggunya, intensitas ini semakin meningkat ketika menjelang bulan Ramadhan.

Kelompok lain yang cenderung dapat bekerja karena intervensi dari institusi kelurahan, seperti kelompok PKK, Karang taruna, dan Dekel. Memiliki struktur rapi dalam menjalankan fungsi dan perannya, namun tidak menjamin program berjalan secara periodik didasarkan pada kesepakatan bersama tetapi melihat pada kebutuhan warga bersifat *incidental*. Kecuali kelompok PKK memiliki jadwal rutin setiap bulan sekali melakukan kegiatan Posyandu keliling dan setiap enam bulan sekali bekerjasama dengan forum warga RW 08 melakukan pengobatan gratis secara massal.

Kemudian berbagai upaya dari birokrasi RW untuk meningkatkan kebersamaan dan solidaritas dalam satu komunitas dengan jalan membuat santunan sosial terhadap anak yatim, santunan terhadap warga yang mengalami musibah kematian dengan membuat wadah Rukun Kematian Swadaya Masyarakat sebesar Rp. 300.000,-. Bantuan sukarela terhadap warga yang sedang hajatan. Kesemuanya bentuk bantuan warga dilakukan dan dikordinir oleh pengurus RW. Pola kegiatan bersama bidang kesehatan merupakan upaya-upaya membangun ikatan sosial, kebersamaan dan menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas.

5.2. Daya Dukung Lingkungan Komunitas

Lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai.

Lingkungan permukiman kumuh memberi dampak yang bersifat multi dimensi diantaranya dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan, tatanan sosial budaya, lingkungan fisik serta dimensi politis. Di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, keberadaan lingkungan permukiman kumuh memberikan dampak citra ketidakberdayaan, ketidakmampuan dan bahkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pengaturan pelayanan kebutuhan-kebutuhan hidup dan penghidupan warga kota maupun pendatang dan pelayanan untuk mendukung kegiatan sosial budaya, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Tidak memadainya daya dukung lingkungan komunitas dalam menjaga keberlangsungan kehidupan warga berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Berdasarkan data penelitian, bertahannya dinamika kehidupan komunitas kumuh dan padat Kampung Rawa Barat mencerminkan dari keberlangsungan kehidupan ekonomi warga yang berjalan cukup tinggi. Dampak terhadap tatanan sosial budaya kemasyarakatan adalah bahwa komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh yang secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dikarenakan lebih banyak bekerja di sektor informal dan semi formal (pegawai swasta 48,6% dan 46,4%; wiraswasta 39,3% dan 36,8% ; dan buruh 55,9%). Sehingga berpengaruh terhadap tingkat penghasilan yang sangat terbatas dan belum mampu menyisihkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak sehingga mendorong terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang pada gilirannya munculnya permukiman kumuh.

Dalam sisi yang lain, tidak memadainya daya dukung lingkungan sosial dan fisik yang tercermin dari sifat kekumuhan, kepadatan bangunan dan kepadatan hunian, hilangnya tata kelola ruang-ruang spasial menyebabkan kehidupan komunitas terancam atau rentan terhadap bentuk-bentuk gangguan dan tentunya berpengaruh terhadap kualitas hidup warga. Upaya pemerintahan dalam rangka melakukan rehabilitasi hunian yang tidak layak melalui Dinas Sosial sepanjang tahun 2008-2009 yang dikerjakan oleh TNI sebanyak 77 rumah di Kampung Rawa dan proyek tersebut dilakukan secara bergelombang dan dalam tahap penyelesaian. Proyek rehabilitasi rumah hunian merupakan satu bentuk

komitmen pemerintahan dalam mendorong keberlangsungan kehidupan komunitas yang lebih baik.¹⁰

5.2.1. Daya Dukung Lingkungan Fisik

Seperti umumnya permukiman kumuh dan padat perkotaan, pola permukiman Kampung Rawa Barat termasuk mengelompok padat. Masing-masing rumah berdempetan dan saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Satu rumah dengan rumah lainnya tidak teratur tata letak bangunannya dan hampir semua rumah tidak memiliki pekarangan, hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan bangunan yang bersifat *horizontal* sudah tidak memungkinkan atau warga lebih memilih model bangunan *vertical*.

Karena wilayah Kampung Rawa masuk dalam program “Mohammad Husni Tamrin” dan perbaikan kampung (*Kampung Improvement Program*)¹¹ yang membangun berbagai infrastruktur jaringan jalan raya dan permukiman dan juga infrastruktur pipanisasi PDAM yang sudah menyeluruh walaupun di beberapa subkomunitas masih menggunakan air genset/pompa air. Hal ini dilakukan sebagai upaya penghematan biaya pembayaran PDAM per bulannya.

Walaupun kondisi jalan cukup baik (beraspal), jaringan jalan raya dijadikan lalulintas angkutan umum, namun jaringan jalan permukiman sebagai lalulintas mobilitas warga dalam kondisi kurang memadai, karena kondisi ukuran lebar jaringan di hampir sudut jalan tidak memadai bahkan di wilayah Pasar

10 Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan pada tanggal 5 Agustus 2008. Pukul 14.30 wib di kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru

11 Darudono seorang ahli perkotaan berpendapat bahwa program MHT III dengan asas tribuna, sosial lingkungan dan ekonomi merupakan satu model penyelesaian masalah permukiman warga miskin yang tepat. sayangnya program yang diaa internasional dinilai mampu meingkatkan mutu lingkungan hidup kota sehingga mendapat penghargaan the UNEP Award (1990) dan the Habit Award (1991) tidak dilanjutkan lagi. Pemerintah justru menekankan pada kebijakan pembangunan permukiman yang cenderung membuat distingsi antara masalah perumahan dengan masalah sosial sehingga dalam kebijakan perumahan untuk rakyat yang digagas menafikan dimensi lainnya seperti sosial dan ekonomi. Pandangan ini mengkerdikan makna proyek MHT, yang sejak semula berdasarkan pendekatan kawasan dimana permukiman tidak dipandang sekedar tempat tinggal melainkan tempat interaksi sosial dan tempat usaha. keterlibatan komunitas sebagai komponen bisa sosial dan pembinaan ekonomi informal didalam kampung menjadi hilang. walaupun ada perbaikan lingkungan hanyalah sekedar membedaki jalan-jalan (kompas, 14/11/2004). dalam arifadi budiarjo (hal 6. Perberdayaan komunitas (COMDEV) di permukiman kumuh Jakarta Studi kasus pada permukiman Penastanggul Jakarta) mei 2006.

Gembrong terdapat ‘gang senggol’¹². Karena tidak memadai, tentunya berpengaruh terhadap bentuk saluran drainase/got yang berfungsi tidak lancar, bahkan ketika hujan turun air akan selalu menggenang.

5.2.3. Daya Dukung Lingkungan Ekonomi

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, sebagian besar warga dalam komunitas merupakan penduduk pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Padang yang sudah 15 tahun keatas mendiami Kampung Rawa (memiliki identitas KTP). Hal ini berpengaruh terhadap status kepemilikan tanah dan bangunan yang sebagian besar didapatkan secara turun temurun (warisan orangtua).

Kebanyakan warga memiliki pekerjaan ganda atau memiliki pekerjaan sampingan diluar pekerjaan utamanya¹³. Sebagian warga permukiman bersandar pada sektor-sektor semi formal dan informal dalam menopang kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan rumah untuk mendirikan badan usaha ekonomi keluarga seperti wartel, jualan voucher pulsa, isi ulang air minum, toko, usaha angkutan, bengkel ataupun sablon sehingga rumah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat hunian sekaligus tempat kegiatan ekonomi keluarga.

Sementara, warga yang bekerja di sektor informal dilakukan di komunitas permukiman seperti warung rokok, warung mie rebus dan kopi, buruh cuci, penjaga toko. Sedangkan sektor informal yang lebih sering dilakukan di luar komunitas adalah kuli bangunan/proyek, sopir ataupun menjadi PKL di Pasar Senen.

Tata kelola lingkungan yang tidak baik yang ditunjukkan dengan tingkat kepadatan bangunan fisik yang tinggi sangat berpengaruh terhadap perilaku warganya. Kemudian sistem ventilasi dan sistem drainase/selokan kurang memadai karena pertukaran udara tidak berjalan lancar dan saluran selokan ditutup untuk dimanfaatkan oleh warga dalam kegiatan ekonomi sosial sehingga

9 Jaringan jalan pemukiman yang memiliki lebar antara 1-1,5 meter sehingga tidak memungkinkan individu warga berjalan sangat leluasa, bahkan ketika berpas-pasan dengan pejalan lainnya paling tidak akan bersenggolan secara tidak sengaja.

13 Pekerjaan utama lebih banyak dilakukan diluar pemukiman seperti pegawai proyek, kantor, sopir dll sementara pekerjaan sampingannya dilakukan didalam komunitas seperti toko kecil, warung sampai pegawai P2KP yang didominasi oleh birokrasi kelurahan.

pemukiman padat dan kumuh masuk dalam kategori “*merah*” yang memiliki kecenderungan rentan terhadap berbagai penyakit seperti Demam Berdarah.

Di tinjau dari aspek ekonomi komunitas, kegiatan ekonomi warga dalam menopang kehidupan sehari-hari cukup “layak”. Walaupun warga tidak memiliki pendapatan pasti perbulannya namun paling tidak warga permukiman mampu bertahan hidup dalam lingkungan. Artinya berapapun pendapatan keluarga per bulannya baik besar dan kecil, warga permukiman mampu mengelola keuangan keluarga sehingga mampu untuk bertahan dan hidup selama sebulan walaupun dengan hidup sangat sederhana.

Walaupun demikian kondisi jenis bangunan rumah-rumah cukup memadai, karena rumah terbuat dari bangunan semi permanen dan permanen. Namun dilihat dari bentuk ukuran, daya tampung dan tata kelola ruangan tidak layak sebagai tempat hunian. Namun demikian fasilitas masing-masing rumah dapat dikategorikan cukup mewah dengan berbagai jenis peralatan elektronik (TV, VCD, Kompor Gas, kulkas), bahkan kebanyakan warga memiliki alat komunikasi (*handphone*) dan sebagian juga memiliki motor.

Tingkat pendidikan warga permukiman Kampung Rawa cukup tinggi (lulusan SMA), tapi belum cukup menjadi acuan terjadinya perubahan kualitas hidup warga. Lulusan SMA atau dibawahnya tidak akan mampu bersaing dengan lulusan sarjana yang lebih dibutuhkan pasar karena hanya mampu mencetak sebagai pekerja-pekerja kasar dengan penghasilan yang relatif kecil. Oleh karenanya harapan akan perubahan kualitas hidup yang lebih baik dalam konteks ekonomi masih jauh dari harapan pencapaian kesejahteraan.

5.2.2. Daya Dukung Lingkungan Sosial

Keadaan sosial budaya Kampung Rawa sangat heterogen dengan memiliki akses terhadap sarana dan prasarana lingkungan yang cukup memadai. Hal ini tercermin dari kondisi sosial budaya warga bercirikan lokal, kedaerahan, bercirikan etnis tertentu sampai agama dan budaya tertentu, kesemuanya hadir dan mendapatkan penampungan dan penyaluran dalam ruang gerak dan insentif untuk menumbuh kembangkan dalam dinamika kehidupan permukiman sekarang. Sementara, akses publik terhadap Puskesmas atau pelayanan kesehatan

rutin, pendidikan, air bersih, jalan dan tempat ibadah ataupun akses informasi cukup terjangkau.

Peranan etnik dan kekerabatan diaktifkan para pelakunya untuk adaptasi dan mobilitas dalam lingkungan permukiman seperti etnik Sunda, Padang, Jawa dan Betawi ; baik bagi para pendatang baru maupun bagi mereka yang sudah mapan kehidupannya dilingkungan permukiman. Struktur relasi dan jaringan sosial menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi warganya. Pola hubungan sosial yang terbangun lebih bersifat *patron-klien* berpengaruh terhadap kehidupan komunitasnya. Hubungan *patron-klien* hidup dalam dinamika kehidupan yang dilandasi atas ikatan-ikatan tradisi, norma-norma dan kesepakatan bersama dalam komunitas bersama.

Bentuk kerjasama atau tindakan bersama warga dalam satu lingkungan komunitas masih dilandasi atas kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan. Kalaupun terbentuk pola kerjasama dan tindakan bersama dalam komunitas sangat dipengaruhi struktur kelompok ataupun institusi kelurahan sehingga bangunan solidaritas antar warga bersifat organik.

Struktur jaringan warga dilakukan baik secara vertikal ataupun horizontal melampaui batas-batas status sosial ekonomi warga. Jaringan sosial terbangun tidak terbatas pada hubungan etnis, kesamaan status sosial ekonomi akan tetapi lebih pada faktor ekonomi sehingga jaringan akan berfungsi ketika ada keuntungan yang didapatkan diantara warga yang melakukannya. Hal ini menunjukkan gambaran tentang kepadatan hunian dan kedekatan sosial secara fisik tidak menjamin terbentuknya ikatan sosial yang kuat, artinya jaringan sosial permukiman kumuh dan padat lebih dilandasi pada kepentingan-kepentingan ekonomi dalam menunjang perekonomian keluarga ataupun komunitas.

Aktifitas sosial warga permukiman lebih banyak dilakukan pada malam hari, karena siang harinya kebanyakan warga melakukan kegiatan ekonomi keluarga sehingga tidak cukup untuk beraktifitas sosial secara total. Namun ada warga yang melakukan sebaliknya ataupun warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap lebih banyak melakukan interaksi sosial dengan warga permukiman pada siang dan malam.

Kemudian, keberlangsungan hubungan warga dengan institusi kelurahan didasarkan pada kepentingan hak dan kewajiban sehingga sifat hubungannya bersifat rapuh. Ikatan sosial institusi kelurahan dengan lingkungan warga terbatas pada hubungan formal, hal ini merupakan dampak status PNS aparat kelurahan. Namun, upaya membangun ikatan sosial yang kuat dan mengurai kebuntuan-kebuntuan jangkauan layanan institusi kelurahan terhadap warganya tetap dilakukan dengan membentuk saluran media berkumpul dan beraktifitas bersama seperti kelompok PKK, Karang Taruna, Dewan Kelurahan, Fakta. Kelompok ini merupakan bentuk saluran media komunikasi bersama dalam membangun ikatan-ikatan sosial antar warga ataupun institusi kelurahan. Walaupun dalam realitasnya tidak berjalan secara efektif, namun keberadaannya paling tidak sangat membantu institusi kelurahan dalam menjangkau layanan dan mengurai berbagai persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam lingkungan komunitas.

